

REKONSTRUKSI DAN  
REVITALISASI  
PENDIDIKAN  
INDONESIA  
MENUJU MASYARAKAT MADANI

Penyusun:

Makmuri Sukarno



**REKONSTRUKSI DAN REVITALISASI  
PENDIDIKAN INDONESIA  
MENUJU MASYARAKAT MADANI**

Penyusun:  
Makmuri Sukarno

Kerjasama antara Kedeputan Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan  
Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Selaku  
Koordinator MOST, UNESCO INDONESIA dengan Komisi Nasional  
Indonesia Untuk UNESCO dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan  
Republik Indonesia

**Jakarta, 2005**

## KATALOG DALAM TERBITAN

Rekonstruksi dan Revitalisasi Pendidikan Indonesia  
Menuju Masyarakat Madani/penyusun, Makmuri Sukarno.  
-Jakarta: LIPI Press, 2005  
v + 49 hlm.; 17.59 x 24.99 cm

ISBN 979-3673-36-2

1. Pendidikan - Kebijakan Publik

I. Makmuri Sukarno

379

*Cetakan Pertama: Mei 2005*

*Editor Produksi* : Sarwintyas Prahastuti  
*Layout* : Prapti Sasiwi  
*Desain Sampul* : Junaedi M

**Diterbitkan Oleh:**



LIPI Press, anggota IKAPI  
Jl. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350  
Telp. (021) 314 0228, 314 6942, Fax. (021) 314 4591  
e-mail : [bmrlipi@uninet.net.id](mailto:bmrlipi@uninet.net.id)  
[lipipress@uninet.net.id](mailto:lipipress@uninet.net.id)

# PRAKATA

Prosiding ini disusun berdasarkan seminar dan lokakarya bertajuk “Rekonstruksi dan Revitalisasi Pendidikan Indonesia Menuju Masyarakat Madani” yang diadakan pada tanggal 2 dan 3 September 2004 di Jakarta. Tajuk ini dipilih atas dasar tuntutan yang lahir, terutama akibat perubahan struktur politik nasional dan kontroversi yang muncul di masyarakat, antara lain di media massa, tentang bentuk upaya yang diperlukan agar sistem pendidikan nasional dapat memperbaharui masyarakat sehingga mampu mengawal dan mengisi proses transisi yang sedang berjalan.

MOST-LIPI merasa terpanggil untuk memprakarsai kegiatan seminar dan lokakarya ini bersama Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (DEPDIKNAS) dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Alasannya antara lain bahwa isu-isu publik seperti ‘pendidikan dan masyarakat madani’ ini perlu dipahami bersama-sama secara dialogis agar dapat melahirkan langkah-langkah yang sinergis, sehingga tidak cukup didiskusikan oleh masing-masing *stake-holders* secara terpisah-pisah.

Seminar dan lokakarya ini bertujuan membangun pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif di antara *stake-holders* tentang mengapa dan bagaimana sistem pendidikan nasional (tidak) dapat berperan efektif dalam membangun ‘masyarakat berkeadaban’ (*civil society*) dalam konteks yang baru. Ranah masalah yang muncul terutama adalah menyangkut isu-isu —bukan pada tataran filsafat manusianya— melainkan pada tataran paradigma, program, manajemen, proses dan sistem evaluasi pendidikan, yang pada umumnya oleh peserta seminar dianggap tidak memadai lagi dan perlu untuk ditata kembali.

Prosiding ini mencoba memberikan gambaran singkat tentang pokok-pokok pikiran yang muncul menyangkut isu-isu di atas beserta langkah-langkah awal yang diperlukan agar Sistem Pendidikan Nasional Indonesia dapat mendorong terciptanya masyarakat madani.

Prosiding ini tidak akan terwujud tanpa kerjasama yang baik dari banyak pihak, terutama para pembicara dan peserta seminar. Oleh karena itu, kepada para pembicara dan peserta seminar, maupun pihak lain yang tidak mungkin kami sebut satu persatu, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Mei 2005

Dr. Dewi Fortuna Anwar, MA., APU

Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan  
Kemanusiaan-LIPI dan Koordinator  
MOST UNESCO Indonesia



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
<b>Executive Summary</b>	<b>1</b>
<b>Prosiding Seminar</b>	
Rekonstruksi dan Revitalisasi Pendidikan Indonesia Menuju Masyarakat Madani	7
I. Pendahuluan	7
II. Visi Masyarakat Madani Indonesia	13
III. Mewujudkan Masyarakat Madani Melalui Pendidikan	15
IV. Paradigma Keberhasilan Pendidikan Menuju Masyarakat Madani	23
V. Manajemen Pendidikan dalam Konteks Nasionalisme dan Pluralitas di Era Globalisasi dan Desentralisasi	27
VI. Proses Pendidikan dalam Rangka Memberdayakan dan Memberadabkan Masyarakat	30
VII. Evaluasi Pendidikan yang Komprehensif dengan Mengacu pada Tujuan Pendidikan	35
VIII. Rekomendasi untuk Upaya Rekonstruksi dan Revitalisasi Pendidikan Indonesia Menuju Masyarakat Madani	39
A. Visi-Misi Pendidikan Indonesia	39
B. Manajemen Pendidikan	40
C. Proses Pendidikan Dalam Rangka Memberdayakan dan Memberadabkan Masyarakat	40
D. Evaluasi Pendidikan yang Komprehensif dengan Mengacu pada Tujuan Pendidikan Nasional	42
Jadwal Acara Seminar Nasional	45
Jadwal Acara Workshop	47



## EXECUTIVE SUMMARY

Krisis multidimensi yang menimpa Indonesia melahirkan kesadaran bahwa sistem bernegara dan bermasyarakat yang selama ini dijalankan tidak memadai lagi untuk menghadapi masalah lokal, nasional dan global yang timbul. Oleh karena itu diperlukan 'format baru' sistem bernegara dan bermasyarakat yang lebih relevan, yaitu sistem pemerintahan yang demokratis dan masyarakat madani (*civil society*). Penciptaan sistem pemerintahan yang demokratis melalui pembaharuan-pembaharuan di bidang politik, hukum, peran TNI dan media penting, namun demikian tidaklah cukup. Pembaharuan di bidang-bidang itu hanya merupakan pembaharuan cara-cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan bentuk masyarakat yang hendak dituju, cara-cara yang pantas dilakukan maupun tingkat kesiapan manusia pelaksana pemerintahan dan kemampuan masyarakatnya untuk mengembangkan diri serta mengontrol dan mendukung negaranya dengan 'baik' sangat ditentukan oleh pendidikan. Di sinilah pendidikan dapat berperan strategis. Peran pendidikan sebagai '*agent of change*' yang strategis itu dapat bekerja secara efektif dan luas, manakala masyarakat melibatkan negara dalam penyelenggaraannya. Namun demikian, oleh karena penyelenggaraan oleh negara dan masyarakat selama ini terbukti kurang mampu mentransformasikan masyarakat menjadi masyarakat berkeadaban dan mampu mendorong terjadinya tata-kelola pemerintahan yang baik, maka sistem penyelenggaraan pendidikan nasional pun perlu ditata kembali. Oleh karena itu, baik untuk tujuan pembaharuan untuk mewujudkan masyarakat madani maupun untuk mendukung terlaksananya tata-kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan revitalisasi dan rekonstruksi sistem pendidikan nasional.

Undang-undang nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional merupakan bagian dari upaya itu, namun demikian tidaklah cukup. Upaya revitalisasi dan rekonstruksi sistem pendidikan nasional untuk menciptakan masyarakat madani memerlukan juga beberapa reorientasi, antara lain menyangkut visi-misi pendidikan nasional, manajemen, proses dan evaluasinya. Reorientasi pendidikan nasional secara umum didasarkan pada filsafat bangsa tentang gambaran manusia dan masyarakat ideal yang akan dituju. Manusia dan masyarakat Indonesia dalam filsafat bangsa adalah manusia dan masyarakat yang religius, kuat, merdeka, adil, beradab, demokratis, makmur dan bhinneka-tunggal-ika. Manusia dan masyarakat seperti itu seharusnya dapat mengendalikan, mendukung serta mampu memberikan orientasi baru kepada negara sehingga negara lebih mampu melayani, melindungi dan mengembangkan jati-diri manusia dan masyarakatnya tersebut. Gambaran manusia dan masyarakat seperti inilah yang secara normatif harus menjadi

**tujuan sekaligus landasan** reorientasi, baik bagi visi misi, manajemen, proses maupun evaluasi pendidikan Indonesia. Dengan reorientasi ini, realitas pendidikan masa lalu, kini dan tantangan mendatang dikaji ulang untuk menentukan langkah perbaikan ke depan.

Visi misi pendidikan Indonesia ke depan diarahkan kepada terciptanya manusia dan masyarakat Indonesia yang *bermartabat* (sejahtera secara ekonomi), *berharkat* (dalam tata-hubungan sosial dan politik) dan *berkeadaban* (dalam memberi makna dan bertingkah laku kepada diri, masyarakat, lingkungan dan Penciptanya). Oleh karena itu, dengan konteks tantangan yang ada, upaya pendidikan untuk mencapai visi-misi seperti itu harus menjadi ikhtiar dengan empat *elan* (semangat): *emansipatif*, *partisipatif* dan *antisipatif* serta *transformatif*. Pendidikan sebagai ikhtiar (politik) *emansipasi* menghindarkan pendidikan menjadi alat (re)produksi kesenjangan dan diskriminasi, *partisipasi* menghindarkan pendidikan sebagai alat eksklusif, dominasi dan marginalisasi, *antisipasi* menghindarkan pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan pola pikir dan tindak reaktif dan sistem yang *obsolete*, sedangkan pendidikan sebagai ikhtiar *transformasi* menempatkan pendidikan sebagai wahana pembaharuan pola pikir, pola tindak dan pola hubungan kuasa yang responsif. Ikhtiar seperti itu mensyaratkan peningkatan kemampuan untuk 'cepat belajar', - bukan sekedar 'menyerap'— apapun dari lingkungan tantangan yang baru, dalam rangka untuk 'mengembangkan', —bukan sekedar 'mempertahankan'— watak jati-diri-masyarakat dan tata kelolanya.

Dengan empat *elan* pendidikan seperti itu, maka model manajemen yang menekankan sentralisme birokratisasi dan model proses pembelajaran 'lama' yang menekankan 'pengalihan' nilai, pengetahuan dan ketrampilan —dan bukan 'diskursus, pembatinan dan pengalaman' —, dirasakan tidak sesuai lagi. Keterlibatan yang lebih besar dari daerah, masyarakat, termasuk yang tertinggal dan terdiskriminasi, serta siswa di dalam manajemen pendidikan, menjadi keharusan. Proses pembelajaran yang lebih menekankan keserentakan pengembangan nalar, rasa dan karya dan lebih melibatkan lingkungan di luar sekolah menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, sistem evaluasi yang selama ini lebih menekankan peran pusat-birokrasi, guru dan arti kinerja nalar siswa belaka serta *out-come* yang pragmatis-ekonomis semata, dirasakan tidak sesuai lagi dengan visi-misi dan *elan* pendidikan yang baru.

Bertolak dari pemikiran-pemikiran di atas, maka rekomendasi bagi upaya rekonstruksi dan revitalisasi pendidikan nasional dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang dicita-citakan adalah sebagai berikut:

## A. Visi-Misi Pendidikan

- 1) Perlu rumusan formal dan indikator masyarakat madani Indonesia yang digali dengan pendekatan kultural;
- 2) Perlu dirumuskan visi pendidikan Indonesia sepuluh atau dua puluh tahun ke depan yang menekankan keseimbangan pengembangan martabat, harkat dan adab;
- 3) Perlu upaya pembentukan *nation building* yang lebih proporsional antara pusat dan daerah, dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal;
- 4) Pendidikan nasional perlu dirumuskan, dikelola dan dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai integritas, hati nurani dan kompetensi.

## B. Manajemen Pendidikan

- 1) Perlu semakin ditumbuh kembangkan paradigma sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam manajemen pendidikan, *capacity building* secara terprogram dan sistematis terutama terhadap daerah dan satuan pendidikan serta perluasan partisipasi masyarakat;
- 2) Perlu pembagian hak-tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat di dalam satuan pendidikan;
- 3) Pemerintah perlu secara konsisten menerapkan aturan yang mampu mendinamisasi masyarakat, melakukan fasilitasi, serta mengkaji dan menindaklanjuti tingkat keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaannya.

## C. Proses Pendidikan

- 1) Perlu rumusan indikator masyarakat madani Indonesia yang lebih operasional;
- 2) Perlu pembenahan proses pendidikan pada lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
  - a. Pada **lingkungan keluarga** perlu dikembangkan sistem pengasuhan yang demokratis, responsif gender dan emansipatif serta pengembangan pendidikan anak sesuai dengan potensinya (minat, bakat, kemampuan intelektual)
  - b. Pada **lingkungan sekolah** perlu peningkatan
    - kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan melayani keragaman kecerdasan dan cara belajar;
    - pengembangan kurikulum yang lebih membuka ruang berkreasi dan ruang non-kognitif, *civic education*, *life skill* yang kontekstual serta *living values* yang universal;
    - penciptaan budaya dan kinerja sekolah yang berlandaskan moral, budaya, empiri dan argumen ilmiah dengan pola pikir konvergen

melalui strategi pembelajaran yang variatif, kontekstual, dan dialogis yang menekankan pada *learning how to learn*;

- pengembangan tiga pendekatan yaitu *pembiasaan*, *pembelajaran* dan *peneladanan* serta penguatan sistem ganjaran-hukuman dan evaluasi pendidikan atas siswa yang diproyeksikan pada tujuan pendidikan;
- pemanfaatan dan mobilisasi berbagai sumber daya sehingga semua pihak mempunyai andil dalam keberhasilan.

c. Pada **lingkungan masyarakat** diperlukan

- dorongan pengembangan kemampuan dan partisipasi masyarakat melalui institusi sosial (formal dan informal);
- pendidikan masyarakat yang menekankan modal sosial dan pendidikan moral.

**D. Evaluasi Pendidikan**

- 1) Perlu sistem evaluasi yang mampu menempatkan perangkat hukumnya (misalnya Undang-undang Sisdiknas) sebagai rujukan, terutama untuk menilai manajemen;
- 2) Perlu model evaluasi yang mengarah pada peningkatan mutu lulusan pendidikan Indonesia agar mampu bermitra dan bersaing dalam forum regional dan internasional;
- 3) Perlu penekanan makna evaluasi sebagai piranti yang dapat menggambarkan dengan baik dan benar hasil belajar sehingga dapat menjadi petunjuk tentang arah dan tonggak yang telah (dan belum) dicapai oleh ikhtiar pendidikan, serta dapat menjadi landasan objektif bagi pengambilan keputusan;
- 4) Perlu pendekatan evaluasi yang komprehensif yang menempatkan siswa, kurikulum, sarana-prasarana, guru, biaya, proses dan evaluasi pembelajaran sebagai sasaran evaluasi terpadu.
  - a. perlu evaluasi yang dapat menilai kemajuan siswa secara utuh, yang meliputi aspek kognitif, psikomotor dan afektif yang mencakup ranah nilai-nilai spiritual-religius, emosional, fisik, etika dan moral, budaya.
  - b. perlu evaluasi terhadap kurikulum berbasis kompetensi, menyangkut,
    - kejelasan makna kompetensi dan ambang minimal materi kurikulum esensial yang harus dikuasai siswa, serta relevansinya dengan standard (ukuran) evaluasi yang akan diterapkan;
    - daya *transformatif* kurikulum terhadap pola pikir, kreasi, tingkat kemampuan *belajar untuk belajar* dan pola tindak individu dan

- tindak sosial siswa (bukan hanya terpaku pada tingkat *transferability* isi kurikulum bagi memori siswa);
- tingkat relevansinya terhadap upaya membangun masyarakat yang maju, sadar imtak-ipitek, hak-azasi manusia, gender, pluralisme budaya, solidaritas dan demokrasi.
- c. perlu evaluasi terhadap Guru berkaitan dengan bentuk interaksi, tingkat internalisasi dan kontekstualisasi pada proses pembelajaran menyangkut
- apakah lebih memungkinkan siswa berkembang secara kreatif, solider, berwawasan kesetaraan dan keberagaman dan mampu belajar dari hal-hal yang kongkrit di luar materi yang diberikan oleh guru;
  - perannya dalam internalisasi kurikulum dan *hidden curriculum*, 'budaya sekolah' dan 'pranata social baru' yang bersifat transformatif menuju masyarakat madani di sekolah;
  - pelaksanaan evaluasi, ganjaran dan hukuman apakah telah realistik sesuai dengan kasus subjek didik, bukan semata-mata mengejar *target* kuantitatif;
  - kontekstualisasi kurikulum dan *hidden curriculum* dengan variasi kebutuhan dan kondisi lingkungan sosial budaya setempat.
- d. perlu evaluasi terhadap kecukupan biaya dan sarana-prasarana yang esensial untuk mencapai pelayanan minimum pada masing-masing satuan pendidikan.
- e. perlu evaluasi terhadap tingkat validitas dan reliabilitas metode yang digunakan berhadapan dengan keberagaman 'objek evaluasi beserta karakteristik dan konteksnya', termasuk kebutuhan politik otonomi dan pengembangan potensi lokal.
- f. perlu diperjelas kriteria dan standar mutu nasional, regional, daerah/ lokal serta tingkat keterlibatan masing-masing dalam evaluasi.
- 5) Perlu evaluasi umum menyangkut efektifitas eksternal untuk mengetahui kontribusi penyelenggaraan pendidikan nasional terhadap upaya pembentukan masyarakat pembelajaran dan dampaknya terhadap upaya pembentukan masyarakat madani;
6. Perlu lebih dilibatkan pihak masyarakat, LSM dan dunia usaha dalam pengendalian kuantitas dan kualitas pendidikan.

*Executive summary* ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat tentang pemikiran dan langkah awal yang diperlukan untuk mengantarkan pendidikan Indonesia guna membentuk masyarakat madani.



*Prosiding Seminar*

**REKONSTRUKSI DAN REVITALISASI  
PENDIDIKAN INDONESIA MENUJU  
MASYARAKAT MADANI**

*Oleh : Makmuri Sukarno*

**I. Pendahuluan**

*Prosiding* ini adalah hasil dari seminar dan lokakarya yang diselenggarakan bersama oleh Program MOST UNESCO-LIPI, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (DEPDIKNAS) dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tanggal 2 dan 3 September 2004 di Jakarta.

1.1. Latar Belakang dan Tujuan Semiloka

a. Latar Belakang

Krisis yang menimpa Indonesia dianggap oleh banyak pihak sebagai bersifat multi-dimensi. Anggapan ini mengandaikan terjadinya kemerosotan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan sistem budaya, sosial, ekonomi dan politik yang selama ini dijalankan. Sistem-sistem itu (dianggap) tidak lagi memadai untuk 'mencerna' masalah-masalah yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, sehingga berkembang patologi budaya, sosial, ekonomi dan patologi-politik yang akut. Hilangnya kesantunan dan keberadaban, munculnya kecenderungan materialistik-hedonistik, konflik horisontal, dan korupsi-kolusi dan nepotisme adalah sebagian simptom dari patologi tersebut. Patologi-patologi itu telah membuat masyarakat dan negara tidak berdaya. Kesadaran tentang hadirnya krisis multidimensi ini, melahirkan gugatan terhadap 'kemacetan' lembaga-lembaga (yang dimiliki) masyarakat (seperti keluarga, sekolah, lembaga agama dan komunitas sebagai agen sosialisasi nilai) dan gugatan terhadap akuntabilitas kinerja pranata struktural (ekonomi, politik dan hukum) yang telah

dilakukan oleh negara yang terbukti tidak sepenuhnya mampu melindungi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Krisis ini juga mendorong lahirnya kesadaran 'baru' bahwa masyarakat tidak dapat lagi mempertahankan 'format' yang lama dalam bermasyarakat (bangsa) dan bernegara, serta kesadaran tentang perlunya dibina bentuk hubungan yang baru antara masyarakat dan negara.

Sementara ini, sumber utama yang dianggap paling bertanggung jawab atas krisis itu adalah bahwa sistem pemerintahan yang ada tidaklah demokratis serta belum terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu langkah yang diambil adalah antara lain reformasi sistem politik, hukum, reposisi peran TNI dan peran media massa sebagai langkah untuk menuju sistem yang demokratis. Langkah ini penting, kendati demikian tidaklah cukup. **Pertama**, reformasi pada pranata bidang-bidang di atas jelaslah tidak akan mampu menemukan bentuk masyarakat baru yang secara filosofis dan etis 'pantas' untuk dituju. Sebab, reformasi di bidang-bidang di atas lebih merupakan perbaikan tata-hubungan kerja dan cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan pertanyaan yang mendasar adalah masyarakat baru (demokratis) seperti apakah yang 'pantas' dijadikan tujuan bersama? **Kedua**, perbaikan pranata (struktural) tidak akan efektif mempengaruhi kinerja, apabila manusianya tidak mempunyai nilai-nilai baru yang cocok dengan pranata baru tersebut. Seharusnya, sistem pendidikan itulah yang strategis untuk menjadi 'titik anjak'. Sebab, pertama, 'budaya diskursus kritis' (*the culture of critical discourse*) yang terdapat di dalam pendidikan memungkinkan kesetaraan partisipasi melalui argumentasi untuk menggali fakta dan nilai-nilai bersama (kekudusan, kebenaran, kebaikan, keadilan, keindahan dan nilai tata-hubungan kekuasaan serta cara-cara yang cocok) yang pantas dimiliki dan diperjuangkan. Dengan diskursus itu, pendidikan menjadi kesinambungan proses 'verifikasi-falsifikasi 'fakta' dan ideologisasi-deideologisasi argumen'. Pendidikan, oleh karenanya memungkinkan masyarakat terus memperlebar dan memperbaharui wawasan dan ketrampilan untuk memperbaharui posisinya dalam menghadapi masalah horisontal dan vertikal yang muncul, sehingga dapat dicegah 'ketertinggalan' (*obsolete*) sistem sosial-ekonomi dan politik masyarakat dan negara. Kedua, melalui ikhtiar pendidikan, nilai-nilai, tujuan dan cara-cara mencapainya yang berhasil digali dan diperbaharui dapat disebar, sehingga budaya manusianya sebagai warga masyarakat dan pelaku pranata struktural secara luas dapat 'diperbaharui'.

Kendati pendidikan dapat berperan strategis, terdapat sekumpulan masalah yang dihadapi upaya pendidikan sendiri untuk menemukan nilai dan cara baru yang bersifat intergratif dan inklusif bagi masyarakat untuk berbangsa dan bernegara. Pertama-tama, masyarakat dengan komunitas dan nilai plural mempunyai masing-masing sistem pendidikannya yang berperan mereproduksi

sistem sosial-budayanya masing-masing. Bahkan, masing-masing sub-sistem pendidikan juga mempunyai kecenderungan orientasi yang bersebarangan menyangkut apakah pendidikan pertama-tama sebagai upaya pengembangan wawasan untuk mengembangkan keberadaban ataukah untuk mengembangkan ketrampilan guna mengembangkan martabat dan kesejahteraannya. Membiarkan masing-masing masyarakat mengembangkan sistem pendidikannya sendiri-sendiri, tidak akan mengantarkan masyarakat kita menjadi masyarakat baru sebagai bangsa yang bersatu. Oleh karena itu, negara berperan penting untuk mencegah disintegrasi (pendidikan) masyarakat, dengan 'mensintesakan' bermacam gambaran masyarakat ideal dan orientasi pendidikan yang terkandung di dalamnya menjadi 'agenda politik' bersama. Negara juga dapat berperan penting melalui sistem pendidikan nasionalnya mendistribusikan secara luas nilai, agenda dan cara-cara 'baru' yang disetujui bersama itu agar masyarakat menjadi satu bangsa dengan budayanya yang 'baru'. Tetapi, di pihak lain, sistem pendidikan sendiri adalah sumber distribusi legitimasi (nilai dan ketrampilan) yang dapat dijadikan alat untuk menggali legitimasi dan kekuasaan serta untuk mentransformasikan masyarakat menjadi alat produksi (ekonomi) belaka. Oleh karena itu, menyerahkan begitu saja sistem pendidikan ke tangan negara (seperti pada jaman Orde Baru) mengandung resiko terjadinya hegemoni negara dan monopoli kebenaran oleh penguasa yang akan menempatkan masyarakat pada posisi yang tidak berdaya. Maka dari itu, hubungan masyarakat dan negara dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan hubungan yang dilematis.

Sejauh ini secara umum masyarakat ideal yang hendak dituju adalah masyarakat madani (*civil society*), yaitu masyarakat berdaya, swadaya, adil dan beradab yang secara vertikal mampu menjadi mitra negara yang tengah mengembangkan kehidupan yang demokratis melalui upaya pembaharuan pranata politik, hukum, TNI, media dst, sementara secara horizontal saling menghormati, toleran terhadap perbedaan, dan mampu mengelola konflik secara damai. Peran sistem pendidikan nasional strategis sekaligus dilematis untuk mencapai baik masyarakat 'baru' yang mampu menjadi mitra negara maupun transisi menuju demokrasi.

#### b. Permasalahan.

Secara politis (formal), telah terjadi upaya 'reformasi' termasuk atas sistem pendidikan dengan lahirnya paket kebijakan pendidikan yang baru. Sistem yang baru ini (al. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20/2003) mencakup tujuan, gambaran konstruksi, hak-kewajiban *stakeholders*, cara penyelenggaraan dan evaluasinya yang baru. Ini menuntut rekonstruksi atas sistem pendidikan yang lama dan revitalisasi nilai-nilai yang relevan dengan konstruksi

sistem yang baru yang masih dalam proses pembentukan. Oleh karena itu, baik sosok nilai-nilai, konstruksi sistem, maupun manajemen dan cara-cara yang dapat mencapai tujuan dan mengisi konstruksi itu, perlu diperjelas dan diperkaya.

Di sinilah masalahnya: Apakah sistem pendidikan yang selama ini kita jalani kurang tepat, sehingga kurang berhasil dalam mengemban peran seperti itu? Atau, apakah bentuk ideal masyarakatnya sendiri sebagai tujuan telah berubah sehingga mengharuskan perubahan sistem (politik dan) pendidikannya? Pertanyaan di atas menyodorkan tiga ranah sekaligus: *Pertama*, apa dan bagaimana masyarakat 'baru' yang dicita-citakan; *kedua*, apa dan bagaimana konstruksi sistem pendidikan yang tepat untuk membawa masyarakat mencapai cita-citanya tersebut; *ketiga*, realitas sosial dan pendidikan seperti apa dan bagaimana (cara) yang hendak ditinggalkan dan yang hendak dilakukan. Ketiga ranah masalah itu bersifat radikal sekaligus transformatif.

Ketiga ranah masalah itu sesungguhnya mencakup beberapa hal. *Pertama*, filsafat sosial (utopia dan ideologi sosial); *kedua*, filsafat politik dan pendidikan (tentang tata-hubungan kuasa dan transmisi-transformasi nilai, pengetahuan, dan ketrampilan), paradigma, sistem, program dan proyeknya yang rasional; *ketiga*, refleksi secara induktif atas praksis pendidikan di lapangan. Begitu mendasar dan luas masalah di atas, maka dengan waktu seminar dan lokakarya yang terbatas ini, ruang lingkup permasalahan tadi dikemas menjadi empat isu: isu visi-misi pendidikan nasional, manajemen, proses dan isu evaluasi. Seminar dengan tema "Rekonstruksi dan Revitalisasi Pendidikan Indonesia Menuju Masyarakat Madani" diharapkan dapat menjadi salah satu arena dialog agar isu-isu di atas lebih terpahami, terutama oleh *stakeholders*, sehingga sistem pendidikan yang dijalani dapat lebih berhasil mengantar masyarakat menuju 'civil society'. Kegiatan ini juga dianggap mendesak untuk segera dilakukan, karena upaya pengembangan demokrasi politik dan *good governance* yang sedang berlangsung akan berkelanjutan manakala masyarakat lebih terdidik, berkeadaban sehingga mampu mengendalikan, mengisi, merefleksi ulang struktur dan kultur politik dan memberikan orientasi baru bagi pemecahan masalah yang muncul.

### c. Tujuan Seminar dan Lokakarya

Tujuan seminar dan lokakarya ini adalah untuk menemukan dan menyebarkan pemahaman mengenai visi masyarakat madani, paradigma pendidikan yang tepat, pengelolaan pendidikan dan cara pembelajaran serta evaluasi yang mampu menciptakan masyarakat madani (*civil society*). Dengan partisipasi pemerhati, pemikir, pengelola dan praktisi pendidikan dalam Seminar

dan Workshop ini diharapkan terjadi refleksi dan dialog secara intensif: bukan hanya atas filosofi yang (seharusnya) mendasari pendidikan, melainkan juga tentang kurikulum, proses pembelajaran, serta konteks manajemen, sosial, ekonomi dan politik yang (tidak) memungkinkan pendidikan memainkan peran untuk mengantarkan masyarakat menuju masyarakat madani (*civil society*).

## 1.2. Perlunya reorientasi pendidikan di Indonesia (catatan dari pembicara kunci)

Sambutan Deputi IPSK-LIPI Dr.Dewi Fortuna Anwar APU dan uraian oleh para pembicara kunci— yaitu Menteri Pendidikan Nasional Prof.Drs.Malik Fadjar M.Sc, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Sri Redjeki Sumaryoto SH dan Prof. Dr. Fuad Hassan—, menampilkan persamaan semangat dengan perbedaan titik tekan, telah menjadi pengantar diskusi yang menarik. Persamaan yang menonjol adalah bahwa pendidikan dipahami sebagai upaya terus menerus masyarakat untuk memupuk nilai, pengetahuan, ketrampilan dan tata-hubungan kuasa yang relevan yang telah dimiliki sekaligus sebagai upaya menemukan yang baru, untuk lebih memanusiakan manusia dalam menghadapi konteks yang berubah. Secara implisit (religius) humanisme dipegangi secara bersama-sama sebagai filosofi. Pada sesi yang memaparkan visi masyarakat madani nanti, filsafat religius humanisme ini terlihat lebih eksplisit. Secara umum para pembicara melihat bahwa filsafat religius humanisme ini sedang mengalami masalah. Bukan pada tataran filosofinya, melainkan pada tataran-tataran yang lebih ‘rendah’; yaitu pada tataran yang lebih bersifat paradigmatis, sistemik, manajemen-programatis, atau lebih bersifat teknis-pragmatis. Para pembicara mengantarkan masalah-masalah di atas dengan menunjuk ranah yang dianggap lebih mendesak untuk didiskusikan.

Deputi IPSK-LIPI lebih menekankan peran transformatif pendidikan yang telah setengah abad kurang bergaung. Sekarang adalah waktunya untuk lebih digiatkan, karena konteks politik yaitu transisi demokrasi yang telah dimulai semakin membutuhkan tampilnya masyarakat madani dan menuntut pendidikan untuk lebih berperan transformatif. Dengan merujuk UU Sisdiknas 20/2003, Menteri Pendidikan Nasional juga mengemukakan bahwa perubahan manajemen (yang juga berisi tata-hubungan kuasa antara pusat-daerah, sekolah dan masyarakat, termasuk dunia usaha), dan kurikulum *life skill* serta pembelajaran yang baru diperlukan untuk membenahi pendidikan nasional dalam menghadapi konteks yang baru.

Menteri Pemberdayaan Perempuan memperlihatkan dimensi diskriminasi, yaitu diskriminasi dan kesenjangan pendidikan perempuan yang muncul akibat nilai tradisional yang mendasarinya. Diskriminasi terhadap perempuan tidak sesuai lagi dengan nilai kesetaraan yang esensial bagi

masyarakat madani, dan bertentangan dengan kenyataan bahwa justru kesetaraan pendidikan perempuan merupakan salah satu kunci keberhasilan upaya pengembangan anak dan kualitas sdm pada umumnya: hal-hal yang sebetulnya dituju oleh upaya pendidikan sendiri.

Pembicara kunci terakhir, Prof. Dr Fuad Hassan, memperlihatkan masalah yang kompleks yang dihadapi ikhtiar pendidikan dalam arti luas, bila tujuan pendidikan (kita) adalah memanusiaikan manusia seutuhnya dan seluruhnya. Menurut pendapatnya, di tengah upaya yang ditandai capaian pendidikan yang selalu menjadi titik *status quo* bagi pijakan ikhtiar pendidikan untuk menghadapi konteks selanjutnya, terdapat tiga pendekatan yang terus dipakai, yaitu, pembiasaan, pembelajaran (terhadap pengetahuan dan ketrampilan) dan penteladanan. Ketiga hal itu mengalami masalah dan ketegangan yang serius ketika muncul perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang baru, akibat pembangunan. Pembangunan di era modern yang mendasarkan diri pada sains dan teknologi cenderung menguatkan nilai utilitarian dan sikap pragmatis sehingga cenderung menyisihkan nilai-nilai yang lain. Kecenderungan tadi juga merasuk ke dalam praktek pembelajaran (pendidikan), terutama di sekolah, dan menimbulkan orientasi yang sangat mengutamakan *out-put* manfaat, sehingga lebih menempatkan manusia sebagai sumber daya dan kurang memberikan pengenalan terhadap nilai-nilai lain (yang non-utilitarian pragmatis), sehingga manusia mengalami reduksi (dehumanisasi).

Perubahan sosial dan budaya yang menyertainya telah menghadapkan masyarakat pada guncangan, karena harus mengambil pilihan nilai-nilai dan cara hidup lama atau baru (seperti *carpe diem*, hidup adalah hari ini) atau membiarkan diri larut tanpa kejelasan pilihan (*ataraxia*). Semuanya cenderung menimbulkan disorientasi. Pada saat seperti inilah, Prof. Fuad Hassan melihat arti pentingnya orientasi pada pendekatan penteladanan yang dapat memperagakan sosok pribadi teladan (*role model*) sebagai sumber pembelajaran, terutama bagi anak dan remaja. Kendati demikian, menurutnya, revitalisasi atau penyegaran ikhtiar pendidikan secara menyeluruh perlu didasarkan pada rancangan menyeluruh dan antisipatif terhadap berbagai kecenderungan. Pendekatannya harus memobilisasi ketiga pendekatan tadi sekaligus, tetapi dengan kewaspadaan agar upaya pendidikan untuk mengejar ketertinggalan tidak jatuh pada jebakan dehumanisasi atau menjadi sekedar upaya ‘penimbunan’ pengetahuan kepada anak didik sehingga menghilangkan masa kanak-kanak mereka.

## II. Visi Masyarakat Madani Indonesia

Bentuk masyarakat seperti apa yang hendak dituju oleh para pendiri negara kita dan terus 'disetujui' oleh generasi berikutnya? Pertanyaan inilah yang tercermin dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh tiga pemakalah tentang Visi masyarakat madani Indonesia. Para pemakalah, yaitu Prof. Dr. Suwito MA, Prof. Dr. Taufik Abdullah dan Drs. Yusuf Supiandi MA, semuanya meletakkan realitas empirik (khususnya realitas politik dan kesejarahan) Indonesia sebagai unit analisis, dengan asumsi yang kurang lebih sama, yaitu asumsi fenomenologis: bahwa realitas empirik politik maupun kesejarahan mempunyai intensionalitas atau arah tertentu yang dituju, yaitu menuju bentuk masyarakat yang secara ideal dicita-citakan, yang kemudian oleh para pemakalah dibuktikan sebagai masyarakat madani.

Pemakalah pertama, Prof. Suwito, merujuk filsafat Ibnu Sina, Al Farabi dan Ibnu Maskawih, yang bersifat Neo Platonian sebagai titik tolak bagi uraiannya. Menurut aliran ini, manusia terdiri dari jasad yang menjadi tumpuan roh *al-bahimiyah* (roh hewani) dan *al-ghadabiyah* (nafsu) dan jiwa yang menjadi tumpuan roh *an-natiqoh* (akal). Aliran-aliran filsafat manusia cenderung menekankan peran utama dari salah satu roh dan masing-masing berakibat pada pandangan yang khas tentang manusia: manusia adalah lemah, kuat atau manusia adalah peragu. Aliran-aliran pendidikan yang timbul dan berkembang bertolak dari (salah satu) asumsi di atas. Sebagai contoh, pendidik yang menganggap para murid adalah manusia lemah cenderung otoriter dan birokratik dalam kegiatan belajar mengajarnya. Sebaliknya pendidik yang beranggapan para murid adalah makhluk kuat, cenderung demokratis dalam belajar-mengajarnya.

Dengan data empiris yang tersurat pada Pembukaan UUD 45 yaitu 'kemerdekaan', 'adil, beradab, makmur', serta motto 'bhineka-tunggal ika' sebagai nilai yang juga diterima sampai sekarang, serta munculnya kebijakan politik dan peraturan pendidikan yang menghargai pluralisme, pendekatan di atas memperlihatkan bahwa manusia kuat-rasional adalah filsafat manusia Indonesia sekaligus cita-cita bangsa. Oleh karena itu upaya untuk mencapainya melalui ikhtiar pendidikan dalam arti luas adalah 'penghargaan terhadap manusia sebagai manusia kuat', dengan kata lain 'memanusiakan manusia'. Pendidikan haruslah merupakan pembudayaan tata kehidupan yang mempunyai karakteristik di atas: mandiri, demokratis, pluralis dan multikulturalis dengan berpegang teguh pada nilai kemerdekaan, keadilan, kemakmuran dan bhinneka tunggal ika: suatu masyarakat madani.

Pemakalah yang lain, Prof. Taufik Abdullah, melihat bahwa realitas sosial dari perjalanan sejarah bangsa secara teleologis menuju kepada *civil society*. Perjalanan itu bermula dari masyarakat 'baru' yang tercipta sebagai bentuk 'keluarga substitute'. Keluarga substitute ini dibutuhkan guna

‘melindungi’ dan memberi ‘tuah’ kepada manusia Minang (dan Nusantara umumnya) yang merantau meninggalkan masyarakatnya yang tradisional ketika di perantauan mereka menemukan realitas politik negara yang abstrak dan tetap meletakkan mereka pada keterasingan. Afinitas dari upaya saling mencari yang dilakukan dari pribadi dan kelompok perantau untuk menemukan arena atau ruang bersama untuk berkomunikasi dan mengatasi keterasingan itu, melahirkan bentuk perkumpulan suka-rela, *inter-personal*, dan swadaya sebagai pranata baru. “Ketika telah berhadapan dengan negara inilah suasana perantara yang menjembatani *the state of nature* dengan negara yang impersonal dan terasa jauh itu konsep *civil society* mulai dipakai” .

Namun demikian, *civil society* dalam konteks kenegaraan seperti ini adalah tatanan sosial sebagai kenyataan empirik kesejarahan belaka, belum sebagai bentuk masyarakat yang diidealkan. Bagi pemakalah ini, bila empirik *civil society* seperti itu dimuati pikiran Pembukaan UUD 45, maka akan bermakna normatif, yaitu sebagai pelaksanaan dari cita-cita ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’. Bila secara projektif tatanan sosial ini diharapkan berperan ‘mendampingi’ negara, maka tatanan sosial itu seharusnya, —sebagai sebuah visi—, berfungsi *protektif* (memberikan perlindungan kepada warga), *komplementer* (melengkapi peran negara yang terbatas dalam mencapai tujuan masyarakat) dan *suplementer* ketika peran negara kurang berfungsi. Dengan fungsi-fungsi di atas maka tatanan sosial itu menjadi masyarakat madani yang, —ke dalam dan ke depan— di harapkan bersifat integratif dan *congenial*, memelihara budaya sosial politik yang sehat, memupuk kesadaran dan tanggung jawab sosial, kreatifitas, kosmopolit, menampilkan diri sebagai ‘masyarakat belajar’ yang dapat memupuk etos kerja, serta memupuk keimanan masing-masing warga.

Pembicara selanjutnya, Drs. Yusuf Supiandi MA mengutarakan sifat-sifat masyarakat madani adalah masyarakat yang berkualitas yang mengedepankan nilai etika, moral, norma dan hukum sebagai landasan membangun, menjaga keseimbangan kepentingan jasmani dan rohani serta menjadikan keadilan dan kesetaraan sebagai fundamennya. Namun kondisi masyarakat Indonesia masih harus dibenahi, direkonstruksi untuk mencapai masyarakat seperti itu. Salah satu hal penting yang harus dibenahi adalah kondisi ketidaksetaraan gender. Berbeda dengan perbedaan jenis kelamin yang natural, ketidaksetaraan gender itu adalah ‘kultural’ sebagai akibat konstruksi sosial budaya, utamanya patriarkhi, yang menempatkan perempuan pada posisi dan peran marginal, yang mengurangi hak-hak asasinya. Bahkan, melalui *stereotyping*, beban ganda dan eksploitasi, maka perempuan menjadi korban dari konstruksi sosial-budaya tersebut. Tetapi, karena ketidaksetaraan gender ini bersifat kultural bukan natural, maka kondisi itu dapat diubah. Salah satu

visi, sesuai dengan amanat GBHN 1999, UU 25/2000 dan Inpres No 9/2000 adalah Visi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan yang antara lain bertujuan pada terciptanya kesetaraan gender tersebut. Strateginya adalah dengan mengarusutamakan gender agar optimal dan seimbang partisipasi perempuan dalam ruang publik, mengembangkan model hubungan kemitraan dan kesetaraan gender, serta memadukan pengalaman peran perempuan dan laki-laki dalam kebijakan dan program. Oleh karena itu perlu dikembangkan alat ukur dan indikator keberhasilan yang lebih tajam bagi upaya-upaya di atas. Antara lain dengan menggunakan *'Gender Empowerment Measurement'* dan *"Gender Related Development Index"*.

Pada sesi ini muncul pernyataan-pernyataan yang menyebutkan ketimpangan gender di masyarakat dan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak mencari kejelasan/klarifikasi terutama tentang istilah dan substansi 'masyarakat madani' sendiri daripada bantahan yang memancing diskusi. Kendati demikian, salah satu isu yang diajukan Prof. Taufik Abdullah, yaitu 'apakah demokrasi adalah sarana ataukah tujuan' bagi masyarakat ketika menuju masyarakat madani, merupakan masalah visioner yang harus dijelaskan terlebih dahulu sebelum merekonstruksi dan merevitalisasi pendidikan nasional.

Pada lokakarya cukup menonjol desakan agar visi pendidikan Indonesia sepuluh-dua puluh tahun ke depan lebih diperjelas, dengan visi yang pendekatannya lebih kultural bukan politis, berangkat dari kondisi daerah, komunitas dan kearifan lokal yang plural, seimbang antara pusat-daerah dan agar dirumuskan, dikelola dan dilaksanakan oleh orang yang mempunyai integritas nurani dan kompetensi.

### **III. Mewujudkan Masyarakat Madani Melalui Pendidikan**

Dua pemakalah berikutnya, Dr. Ing. H. Fauzi Bowo dan Dr. Makmuri Sukarno menguraikan tema ini dengan mencoba memberikan gambaran dua dimensi: Pemakalah pertama, seorang wakil gubernur, menggambarkan bagaimana masyarakat madani (seharusnya) dibangun bersama oleh pemerintah daerah (DKI) dan masyarakat, sedangkan pemakalah berikutnya membahas bagaimana politik dan praktek pendidikan dapat mengantarkan maupun sebaliknya menggagalkan upaya masyarakat menuju masyarakat madani.

#### **1) *Bagaimana masyarakat madani (seharusnya) dibangun bersama pemerintah daerah dan masyarakat luas melalui upaya pendidikan?***

Pemakalah pertama menyebutkan bahwa kendati masyarakat madani mempunyai makna yang berubah, sesuai dengan konteks politik dan kondisi negara, namun secara substantif terdapat nilai-nilai yang tetap dan pada dasarnya nilai itu telah lama hidup pada bangsa Indonesia: visi moral, kebenaran,

keramahtamahan, keindahan, keadilan, dan kemerdekaan serta semangat saling mengasuh dst. Oleh karena itu mengembangkan nilai masyarakat madani adalah dengan “mendidik generasi muda dengan tidak melupakan tradisi-tradisi budaya kuno bangsa ini”.

Nilai masyarakat madani yang sebenarnya telah hidup lama dalam masyarakat kita itu mencuat menjadi aspirasi. Aspirasi masyarakat yang bertolak dari nilai madani itu diamanatkan kepada pemerintah (al. pemerintah daerah DKI) untuk dikembangkan bersama masyarakat, melalui peran masing-masing, termasuk dalam upaya pendidikan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan masyarakat madani peran pemerintah dan peran masyarakat harus bersinergi melalui kerja sama. Peran pemerintah adalah fasilitator dan dinamisator, antara lain dengan sepuluh program pembangunan pendidikan: a.l (di luar sarana-prasarana fasilitas) yaitu meningkatkan kuantitas, kualitas (termasuk insentif) dan kompetensi guru, memberikan bantuan guru/kepala sekolah di sekolah swasta, beasiswa, penetapan standar materi pelajaran pokok, kompetensi siswa, penilaian hasil belajar dan penetapan kalender pendidikan. Sedangkan peran masyarakat a.l menyelenggarakan pendidikan swasta, menyusun bersama pemerintah peraturan/perundangannya, membiayai penyelenggaraan pendidikan, membantu pemikiran melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dunia usaha memberikan kesempatan magang, pengembangan metode dan standardisasi melalui asosiasi kepakaran.

Di tengah upaya membangun sinergi pemerintah dan masyarakat, persoalan yang tumbuh yang tidak mendukung terwujudnya masyarakat madani dan menunjang proses demokratisasi, menurut pemakalah adalah terutama rendahnya pendidikan, pendapatan dan kesadaran hukum, di samping gejala rendahnya etika politik dan etika pelaku media. Oleh karena itu intervensi guna mewujudkan masyarakat madani melalui pendidikan seharusnya didahului dengan telaah strategis dan telaah atas masalah utama agar paradigma penataan pendidikan dapat memenuhi kebutuhan. Kendati belum ditemukan paradigma penataan pendidikan yang tepat, pemakalah melihat perlunya intervensi melalui upaya-upaya “penyadaran” untuk membentuk masyarakat madani: Penyadaran tentang hak dan kewajiban azasi manusia, keadilan social dan partisipasi demokratis dalam pengambilan keputusan pemerintahan, penyadaran toleransi dan kemajemukan, semangat mengasuh dan melayani, kerja sama, wirausaha, kreatifitas, kepekaan gender, keterbukaan terhadap perubahan, melindungi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. *Civic education* menjadi penting sebagai upaya penyadaran ini.

- 2) *Bagaimana politik dan praktek pendidikan dapat mengantarkan maupun sebaliknya menggagalkan upaya masyarakat memuju masyarakat madani?*

Pemakalah berikutnya, Dr. Makmuri Sukarno menyebutkan bahwa terdapat aliran pendidikan yang pesimistik dan aliran yang optimistik terhadap pendidikan sebagai cara menuju masyarakat demokratik dan madani. Teori yang pesimistis melihat pendidikan tidak lebih dari upaya kelompok elit untuk memelihara atau mereproduksi nilai dan tatanan hubungan sosial yang ada. Sedangkan teori yang optimistis melihat bahwa pendidikan dengan acuan yang khas yaitu budaya telaah dan diskusi mencari kebenaran dengan cara sama-sama mengambil 'jarak' yang *bebas* atas objek kajiannya, maka pendidikan pertama-tama dapat menempatkan peserta didik pada tataran yang bebas dan setara. Dengan 'jarak' yang bebas, terbuka peluang untuk menolak, menerima ataupun menemukan sintesa pandangan atas objek-objek kajiannya, maka terbuka pula peluang untuk memiliki 'wawasan' luas dan pluralis, dan untuk melakukan perpindahan dari 'habitat' nilai, pengetahuan, dan ketrampilan dan tata hubungan kuasa yang semula dimilikinya: mobilitas budaya. Perpindahan budaya ini biasanya diikuti dengan perpindahan status sosial ekonomi (mobilitas sosial), tempat tinggal (mobilitas geografik) dan diikuti upaya membangun 'habitat sosial, budaya dan politiknya' yang baru. Mobilitas budaya, sosial dan geografik yang besar akibat pendidikan massal tidak hanya mampu mendukung industrialisasi dan melahirkan kelas menengah, melainkan juga melahirkan massa yang kritis yang lebih terlibat pada lembaga sosial skala besar yang melampaui 'suku dan agamanya'. Dengan demikian pendidikan merupakan faktor yang sangat penting bagi terciptanya masyarakat madani.

Teori yang optimistik inilah yang dianut oleh para pendiri Republik Indonesia. Ir. Sukarno menginginkan pendidikan nasional tidak untuk menciptakan 'kaoem intjlek-intjlek' atau kuli, dan Ki Hadjar Dewantara ([1945] 1963:166) menginginkan 'dunia pendidikan' sebagai 'mimbar umum' yang bebas dari "*politieke koloniale sleur dan cultureele adat verstarring*". Pendidikan sebagai "mimbar umum" yang diidealkan Dewantara adalah sebagai domain masyarakat yang seharusnya berada antara kekuasaan dominan yang (cenderung) eksploitatif dan komunitas adat yang sempit. Ki Hadjar mengidealkan bahwa pendidikan nasional sebagai arena *civil society* sendiri untuk menuju masyarakat demokratis. Semangat seperti itu nampaknya tercermin pada tujuan pendidikan dan pengajaran yaitu "..... membentuk manusia susila yang cakap dan *warga negara yang demokratis* serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air" (Undang-undang pendidikan nasional tahun 1954, Bab II pasal 3).

Kendati demikian, yang terjadi kemudian di Indonesia adalah bahwa— seperti umumnya terjadi di negara baru yang mencoba mengkonsolidasikan diri— mandat penyelenggaraan "pengajaran nasional" dan "pengembangan kebudayaan nasional" diperlebar oleh pemerintah yang berkuasa dengan cara

melangkah dan menguasai ranah nilai dan budaya yang seharusnya menjadi domain masyarakat. Hal itu tak dapat dilepaskan dari fakta bahwa pemerintah Indonesia mendapatkan mandat politik seperti terlihat dalam UUD 45 Pasal 31 (1). Tiap-tiap warga negara berhak *mendapat* pengajaran. (2). Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32. “pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia”. Tetapi, bagian yang krusial adalah bahwa ayat 1 ‘warga Negara berhak mendapat pengajaran’, di mana bahan ajar (pengajaran) dalam konsep yang semula ada waktu itu lebih berhubungan dengan ‘*science and knowhow*’, dan ayat 2 ‘Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem *pengajaran* nasional (bukan pendidikan, penulis), wewenang yang terakhir ini oleh pemerintah dalam prakteknya diperlebar menjadi *pendidikan* dengan memasukkan juga materi didik berupa nilai-nilai termasuk ideologi tertentu yang seharusnya menjadi domain masyarakat. Ini syah karena pemerintah mendapat mandat pasal 32: “memajukan kebudayaan Nasional Indonesia”. Pelebaran wewenang ‘menyelenggarakan sistem *pengajaran* nasional’ menjadi ‘menyelenggarakan sistem *pendidikan* nasional’ untuk menampung mandat ‘memajukan kebudayaan Nasional Indonesia’ itu sebenarnya membuka peluang yang penting bagi negara untuk mengembangkan ideologi negara untuk tujuan *nation/state building* maupun untuk mengembangkan watak masyarakat untuk tujuan pengembangan *civil society*. Namun demikian, di dalam negara yang demokrasinya lemah, peluang itu rentan terhadap tujuan yang sebaliknya, yaitu tujuan pengembangan hegemoni untuk melanggengkan kekuasaan.

Peluang emas untuk membangun ‘*nation/state and character bulding*’ yang terbuka pada sistem *pendidikan* nasional diambil oleh negara muda Indonesia untuk mengelola keanekaragaman kultur, etnik, sosial dan agama. Upaya itu cukup berhasil pada tataran individu para siswa –belum pada tataran sosial—sampai akhir tahun 50-an. Sebaliknya, upaya membangun hegemoni untuk melanggengkan kekuasaan melalui sistem pendidikan nasional nampak pada pendidikan ideologi Nasakom dan pada pendidikan Pancasila serta P4. Hegemoni melalui Pancasila dan P4 dilakukan dengan seleksi dan distribusi nilainya yang cocok untuk tujuan ‘penyadaran’, bukan tentang kebebasan, persaudaraan dan kesetaraan atau demokrasi, melainkan terutama tentang stabilitas dan harmoni hierarkhis. Kesadaran ini di masyarakat menempatkan penguasa sebagai Pancasilais dan *manggala*, penafsir utama dasar-dasar kehidupan manusia (Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil) sehingga tampil citranya sebagai ‘*satria pinandita*’ (penguasa sekaligus pandita): citra yang secara politis dan ideologis dominatif.

Dengan sistem politik yang sentralistik, maka secara vertikal terjadi seleksi dan standardisasi kurikulum yang penerapannya diselenggarakan secara *top-down*, sehingga menempatkan guru sebagai bagian dari birokrasi. Guru tidak lagi menjadi mitra dialog tetapi sosok yang mewakili kekuasaan. Oleh karena itu, dengan ‘kodifikasi’ kurikulum tunggal dan praktik pembelajarannya yang indoktrinatif, guru (termasuk para manggala) menjadi agen yang mereduksikan pluralitas nilai-nilai dan terutama pluralitas tata hubungan kuasa sebagai realitas pengetahuan dan pilihan sistem. Dengan politik yang sentralistik itu, sistem pendidikan di luar sistem yang resmi (yang umumnya diupayakan oleh komunitas *civil society*) dikoptasi dan dimarginalisasi, sehingga terjadi *hegemony of meaning* oleh penguasa. Secara horisontal tidak terbuka koridor untuk mengembangkan pluralitas nilai, sehingga mengarah pada terciptanya *single pattern of mind* di masyarakat. Di pihak lain, koridor yang dibuka lebar bagi pendidikan adalah dunia industri dengan budayanya yang juga hierarkhis. Oleh karena itu, sosialisasi yang ada melalui pendidikan dan dunia kerja bukan terutama *academic meritocracy* apalagi kebebasan, solidaritas dan keadilan (demokrasi) melainkan sosialisasi hierarkhi-dominasi. Di sekolah, anak disosialisasikan sehingga menerima dan adaptif terhadap kenyataan nilai dan tata hubungan kuasa politik dan industri yang dominatif, sehingga sekolah menjadi institusi sosialisasi kehidupan non-demokratis. Pendidikan dan industri menjadi alat reproduksi sistem (neo)feodalisme. Realitas di atas menjadi wajar belaka, karena upaya untuk membentuk ‘warga negara yang demokratis’, sejak tahun 1989 memang dihapus dari tujuan pendidikan nasional (UU No 2/1989).

Upaya instrumentasi sistem pendidikan nasional sebagai alat hegemoni dan dominasi seperti itu cukup ‘berhasil’, karena pola pikir yang tercipta oleh politik pendidikan yang ada melemahkan pelaku *check and balances* dalam sistem politik, melemahkan embrio *civil society* dalam mengembangkan ‘ideologi *civility*’nya, al. keswadayaan, kebebasan, persaudaraan dan kesetaraan serta demokrasi, serta kuatnya kecenderungan praktek pendidikan (di sekolah) sebagai upaya sosialisasi siswa terhadap budaya hierarkhi yang menjanjikan ganjarannya pada dunia industri yang tumbuh.

Oleh karena itu kelas menengah yang lahir akibat pendidikan massal dan industrialisasi adalah kelas menengah yang dependent dan adaptif. Namun demikian, dengan mobilitas horisontal yang dihela oleh urbanisasi – industrialisasi, di perkotaan terutama, telah tercipta masyarakat plural. Tetapi, karena masyarakat plural tersebut bertumpu pada mobilitas sosial-ekonomi dan spasial tetapi *tidak* didasari mobilitas kultural yang memadai (multikulturalis, toleran) maka masyarakat yang ada tersegregasi, dengan kepentingan kelompok

yang saling berbenturan di dalamnya. Dalam persepektif ini tatanan yang demokratis dan masyarakat madani menjadi *kebutuhan* justru untuk mengurangi benturan dan menemukan kepentingan bersama, secara swadaya. Kelompok LSM, intelektual, lintas suku, lintas agama dan etnik/golongan waktu itu tumbuh untuk mengembangkan tatanan demokratis yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kehidupan bersama, terutama di perkotaan.

Dengan jatuhnya pemerintah Orde Baru, proses transisi demokrasi dimulai. Tetapi proses transisi demokrasi, dan bahkan kehidupan demokrasi yang berhasil dibina sekalipun, tidak akan berjalan lestari tanpa dukungan masyarakat madani (*civil society*). Di sinilah permasalahannya: bagaimana di tengah konteks yang berubah sistem pendidikan mampu menciptakan masyarakat madani? Re-orientasi politik pendidikan agar menuju demokrasi dan *civil society*, menurut Makmuri Sukarno, dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, demokratisasi pendidikan *melalui* filsafat, kurikulum dan proses pendidikan/pembelajaran yang baru. Kedua, demokratisasi pendidikan *pada* sistem pengelolaan/penyelenggaraan pendidikan.

*a. Demokratisasi melalui filsafat, kurikulum dan proses pembelajaran yang baru.*

Filsafat pendidikan yang menekankan nilai-nilai universal yang dimiliki generasi sebelumnya dan sains sebagai pokok bahasan tentatif dan dinamis merupakan aliran yang sangat berpengaruh di Indonesia. Dalam prakteknya aliran ini cenderung menempatkan guru sebagai pihak yang tahu sedangkan murid dianggap tidak tahu apa-apa sehingga rentan terhadap praktek hubungan yang anti kesetaraan. Oleh karena itu, salah satu re-orientasi yang muncul untuk pembaharuan pendidikan mengedepankan perlunya kurikulum ditentukan bersama siswa, guru, ahli kurikulum, masyarakat, pemerintah dll dan diberikan dengan cara interaktif antara siswa-siswa dan guru.

Tetapi pemakalah melihat bahwa selama sikap ontologis-epistemologis yang mempercayai adanya kebenaran tunggal, universal-objektif belum diubah, maka pendidikan akan tereduksi sebagai tehnik dan prosedur agar siswa menemukan kebenaran universal objektif itu melalui peran guru sebagai fasilitator. Keikutsertaan stakeholder dalam menentukan kurikulum dan metode interaktif ini memang menimbulkan sikap kritis. Namun demikian, karena sikap epistemologis-filsafatnya tidak mampu melihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara 'pengetahuan, kepentingan dan kekuasaan' maka pembelajaran tersebut cenderung mendorong siswa memahami pengalaman (dari interaksi guru-kurikulum-siswa) tersebut sebagai 'netral-objektif' dan 'tidak problematik'

bahkan mendorong ke arah pembenaran diri (Giroux dan Aronowitz, 1990:116-17). Oleh karena itu, agar dapat menciptakan masyarakat yang kritis tetapi mampu berempati, diperlukan filsafat pendidikan yang mampu menunjukkan bahwa penciptaan dan transmisi budaya dan pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan dan kekuasaan. Reorientasi ini memberikan, bukan hanya pendalaman sikap kritis (memetakan kembali, demistifikasi pengetahuan dan tradisi) melainkan juga memungkinkan pemberdayaan diri dan solidaritas terhadap ‘korban’ dari ‘pengetahuan’ yang dipahami atau diciptakannya. Reorientasi seperti ini menciptakan kesadaran tentang perlunya menemukan kepentingan orang lain (kekuasaan *vis a vis* penderitaan) yang terpendam pada setiap narasi.

Ia tidak hanya memfokuskan pada isu dialog dan pertukaran yang menempatkan proses belajar-mengajar menjadi media fasilitasi anak untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Lebih dari itu, ia juga menempatkan ‘cara memahami’ dari siswa sendiri sebagai salah satu masalah, dan menempatkan kepentingannya sendiri yang terkandung di dalamnya sebagai suatu tindakan (etik) yang beresiko bagi orang atau pihak lain. Dengan itu maka ‘persepsi, kognisi, dan ‘kontradiksi’ serta afeksi yang etis’ akan memperluas wawasan dan mendorong peserta didik untuk menjangkau kemungkinan hidup bersama yang baru. Ini memungkinkan siswa untuk menulis ulang— untuk memperbaharui—kesalahan ‘sejarah’ pergulatan diri dan kelompoknya yang telah membentuk memori, perasaan dan keterbentukannya, sehingga tidak hanya memungkinkan pengembangan pluralisme, melainkan juga rekonsiliasi. Reorientasi filsafat pendidikan seperti itu akan mengembangkan sikap kritis konstruktif terhadap ‘*authority*’ (tata hubungan vertikal) dan solidier (horizontal) terhadap sesama sehingga dapat menyumbangkan pada pengembangan *civil society*.

#### b. Demokratisasi pada pengelolaan/penyelenggaraan pendidikan

Bagian terpenting bagi pengembangan demokratisasi dan *civil society* yang diberikan oleh kebijakan (pendidikan) nasional yang baru, menurut Makmuri Sukarno adalah demokratisasi pada penyelenggaraan pendidikan.

*Pertama*, dengan lahirnya UU 20/2003 (Sisdiknas) dan UU 32 /2004 (Otda). Paket kebijakan itu, tidak hanya ingin mengembalikan ‘demokrasi’, melainkan juga ‘kemandirian’ peserta didik, hak politik masyarakat dan daerah untuk menyelenggarakan pendidikan dan cara-cara penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, non-diskriminatif dan pluralis. Bagian yang sangat penting bagi pengembangan *civil society* dari undang-undang tadi adalah perlunya diakhiri diskriminasi terhadap lembaga-lembaga pendidikan swasta yang menjadi bagian dari ekspresi lembaga-lembaga *civil society* .

Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri (*non-state institution*) untuk menyalurkan aspirasi masyarakat di-*design* mempunyai empat peran (pertimbangan, mediasi, kontrol dan perbantuan) memungkinkan masyarakat '*berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan*'. Secara *normatif* design seperti itu memungkinkan lembaga pendidikan menjadi ruang publik dan arena partisipasi politik masyarakat. Kendati demikian, di lapangan mulai tampak gejala resistensi penguasa dengan upayanya 'mengembalikan' lembaga masyarakat itu menjadi alat pemerintah, sehingga melahirkan 'partisipasi demokrasi yang semu' dalam pendidikan.

*Kedua*, bila pemerintah pusat dengan sadar *lebih* mengkonsentrasikan diri pada 'bahan ajar' (Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) seperti terlihat pada Ujian Akhir Nasional, dan lebih memberikan hak kepada sekolah/masyarakat dan daerah untuk ikut berkecimpung pada 'materi didik' (nilai-nilai, sejarah, budaya dst, dengan UAS-nya), maka kecenderungan ini juga *mempersempit* ruang gerak penguasa (pusat) untuk memanipulasi nilai-nilai untuk mengokohkan hegemoni. Kendati demikian, terdapat bahaya bagi negara apabila *hanya* mengkonsentrasikan diri pada 'bahan ajar', karena reproduksi nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara (nilai-nilai universal dan kesatuan Indonesia) juga merupakan kebutuhan dasarnya. Di samping itu reproduksi nilai di atas oleh negara adalah penting untuk mencegah berkembangnya nilai-nilai parokialistik di masyarakat dan daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai itu.

Demikianlah, maka paket kebijakan yang diberikan dua undang-undang itu agaknya memberikan *konteks* baru bagi demokratisasi. Namun demikian, masalah yang masih tersisa antara lain adalah *teks* (isi) dan metode pendidikannya, baik di tingkat sekolah/masyarakat daerah dan negara, masih memerlukan pembaharuan dan penyempurnaan agar dapat mendorong terciptanya watak masyarakat (madani).

Pada sesi ini, menjawab pertanyaan tentang hambatan yang dialami daerah untuk membangun sinergi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, pemakalah Dr. Ing Fauzi Bowo menguraikan tentang ketidaksiapan dua pihak, terutama masyarakat. Di tengah kondisi aparat yang sebagian kurang siap, upaya *capacity building* yang dilakukan oleh pemerintah DKI agar masyarakat berdaya pun berhadapan dengan kenyataan bahwa masyarakat lebih tertarik untuk menyuarkan keluhan pribadi daripada mengajukan masalah dan agenda masyarakat publik. Mengubah *mind set* kedua belah pihak sangat dibutuhkan, dan pendidikan diperlukan. Pada sesi ini juga muncul pertanyaan dan jawabannya tentang masyarakat madani sebagai masyarakat yang mempunyai dimensi horisontal (ikatan nilai dan upaya bersama) dan dimensi

vertikal yaitu melingkupi dan mengawasi negara. Seorang peserta, Prof. Conny, melihat arti penting pemahaman terhadap proses terjadinya hegemoni dan upaya mengurangi hegemoni negara melalui pendidikan. Oleh karena itu, disarankan agar hak-hak dan kewajiban serta ranah masyarakat *vis a vis* negara dalam pendidikan harus diperjelas. Pertanyaannya adalah bagaimana koordinasinya untuk menghadapi kelompok yang tidak setuju atas pengurangan hegemoni negara tersebut. Jawabannya menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah palagan (*battleground*) kelompok-kelompok politik, sehingga cara yang harus ditempuh adalah perjuangan politik pendidikan. Disebutkan pula bahwa paket kebijakan pendidikan yang baru (kurikulum, penilaian UAN-UAS dan partisipasi politik masyarakat melalui Dewan Pendidikan dan komite sekolah), telah mengarah pada pengurangan hegemoni oleh negara tersebut. Namun demikian, seorang penanya meragukan apakah dengan perangkat hukum dan kelembagaan (misalnya komite sekolah) masyarakat akan mampu mengurangi hegemoni negara, karena realitas hukuman atas kesalahan yang tidak sebanding antara pelanggaran terhadap hak negara (hukuman berat) dibandingkan pelanggaran terhadap hak masyarakat (hukuman ringan).

#### **IV. Paradigma Keberhasilan Pendidikan Menuju Masyarakat Madani**

Tiga pemakalah, yaitu Prof.Dr. Conny R.Semiawan, Romo Mudji Sutrisno dan Dr. Leila Retna Kumala menyajikan paparan tentang paradigma keberhasilan pendidikan menuju masyarakat madani. Pemakalah pertama, Prof.Dr. Conny R.Semiawan, terlihat ‘progresif’ dengan menekankan bahwa “perubahan sebagai kekuatan utama yang berdampak pada semua aspek kehidupan”. Tuntutan *adaptasi* terhadap perubahan itulah yang seharusnya menghela ikhtiar pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah hari ini dan ke depan. Perubahan yang sangat cepat akan melahirkan perubahan tuntutan terhadap ikhtiar pendidikan, sehingga memerlukan perubahan paradigma pendidikan. Paradigma pendidikan yang bertumpu pada pendidikan formal saja tidak cukup, karena pendidikan formal saja tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat yang dituntut terus menerus belajar sepanjang hayat (di luar sekolah). Oleh karena itu, di samping perlu paradigma yang memasukkan konteks lebih luas (pendidikan informal dan non-formal), diperlukan juga pendekatan baru yang dapat memperlengkapi manusia dengan pengetahuan khusus, **sehingga bukan saja seseorang dapat memainkan perannya sebagai tenaga profesional, melainkan lebih dari itu mampu belajar secara berkelanjutan.** Pertanyaannya bagi pendidikan adalah: Kemampuan apa yang dipersyaratkan agar seseorang dan masyarakat dapat bertahan dan produktif sesuai hak dan kemampuannya dalam masyarakat masa depan?

Masyarakat masa depan adalah masyarakat informasi yang bersifat global yang menuntut kompetisi di segala bidang, sebagai akibat revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat seperti itu memberikan peluang kepada setiap orang untuk meraih kesempatan partisipasi. Masyarakat seperti itu juga ditandai dengan re-spiritualisasi, yang dengan *'a deep inner reflection'* dan *'authority from within'* membentuk identitas, kemandirian prakarsa dan akuntabilitas serta kerja sama. Penyesuaian menuju masyarakat seperti itu memerlukan pergeseran pola pikir dan tanggung jawab masyarakat agar generasi muda mampu memasukinya. Tetapi, di pihak lain, masyarakat kita sekarang masih ditandai dengan kondisi kemiskinan, pengangguran, kualitas SDM rendah, ketidakadilan sosial, ekonomi politik dan hukum. Di samping itu dunia pendidikan kita ditandai dengan komersialisasi, pengabaian terhadap 'pencarian pengetahuan' itu sendiri, rivalisme, dan keterasingan dan kepasifan peserta didik dst: kondisi yang jauh dari tanda-tanda dan tuntutan masyarakat masa depan tadi.

Kendati demikian, Prof Conny melihat bahwa Filsafat Pendidikan yang terkandung dalam UUD 45 dan UU Sisdiknas 2003, memberikan landasan yang cukup untuk mempersiapkan generasi muda menyongsong tuntutan masa depannya, karena menjamin hak-hak pendidikan dan pengajaran kepada setiap warga negara, dengan potensi dan konteks masing-masing. Dengan mengacu kepada perlunya adaptasi terhadap perubahan, maka dalam membangun paradigma baru sistem pendidikan harus memperhatikan dan mengembangkan bakat-bakat potensi manusia secara optimal sebagai keutuhan yang terarah.

Oleh karena itu acuan yang diperlukan, sekaligus untuk mengukur keberhasilan adalah *Human Capacity Development Index*, dan tidak relevan lagi *Human Resource Development Index*, karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Pendidikan adalah kendaraan mencapai keterwujudan manusia unggul yang bertumpu pada motivasi intrinsik menuju kinerja yang akuntabel, berkualitas dan otonom sebagai manusia yang bermartabat, bukan semata manusia yang diperuntukkan bagi mekanisme pasar yaitu *supply-demand*. Boleh dikatakan bahwa manajemen pendidikan untuk *Human Capacity Development* adalah *brain power planning* bukan *man power planning*. Paradigma keberhasilan sistem pendidikan masyarakat madani yang demokratis dan egaliter dengan suasana re-spiritualisasi memberikan peluang partisipasi individu dan masyarakatnya (yang berbeda konteks dan karakteristik sosial, budaya dan ekonominya) untuk mengaktualisasikan motivasi intrinsik dan spesifik, sehingga berkembang seluruh kemampuannya seoptimal mungkin secara produktif dan kreatif. Paradigma keberhasilan seperti itu menuntut perubahan perangkat 'masukan', yang fleksibel tetapi cermat, mengutamakan kerja sama serta terbuka

untuk diperbaharui terus dengan tindakan dan refleksi atas masalah tuntutan jaman.

Oleh karena itu perlu peninjauan atas kondisi aktual pembelajaran kita yang masih ditandai dengan menonjolnya prinsip dan ketrampilan teoritis yang 'kaku', kurang *transferable* apalagi fleksibel untuk menanggapi situasi spesifik. Di samping itu 'penguasaan materi tuntas' masih sangat bermakna individual, sedangkan dunia kerja menuntut 'kerja sama'. Di sekolah-sekolah kita, pengembangan pikiran kurang memanfaatkan 'alat pikir', berbeda dengan di dunia kerja. Sekolah-sekolah kita juga mengandalkan cara berfikir simbolik, padahal dunia nyata mengandalkan keterlibatan tindakan langsung. Kesenjangan seperti ini memerlukan perubahan strategi pendidikan, dan dengan demikian strategi penilaian. Diperlukan strategi yang mencakup pengalihan pengetahuan silang lingkungan, silang konteks dan silang perangkat. Pendekatannya perlu interdisiplin, multidisiplin dan transdisiplin.

Pemakalah berikutnya, Romo Mudji Sutrisno, mencoba mengupas frasa "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang ada di dalam UUD 45, sebagai pijakan pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang dicita-citakan. Frasa "mencerdaskan kehidupan bangsa" mengandung dua nilai: nilai kultural yaitu proses pendidikan meningkatkan penguasaan ilmu dan nilai kepentingan yaitu pendidikan untuk masa depan bangsa, yaitu humanisasi. Oleh karena itu frase itu bermaksud agar semakin berharkat orang perorang dan semakin kultural beradab hubungan saudara sebangsa. Dengan pengetahuan maka bangsa dicerahkan dan dimerdekan, sedangkan dengan kepentingan pendidikan yaitu humanisasi, maka bangsa diberadatkan. Pencerdasan kehidupan bangsa juga merupakan sikap, yang relevan untuk menghadapi kecenderungan sekarang, yaitu kepentingan komoditisasi (ekonomi dan kapitalisme) dan kecenderungan tata hubungan sosial tuan-hamba. Komoditisasi dan instrumentasi untuk penghambaan yang harus dilawan itu juga termasuk komoditisasi dan instrumentasi sekolah dan pendidikan (Kapitalisasi sekolah dan politisasi pendidikan). Dengan demikian, frasa di atas harus kembali ditegaskan pada tiga maknanya: sebagai upaya pencerahan dan pemerdekaan bangsa dari kebodohan, keterbelakangan (*in-human*) menuju humanisasi, sebagai titik re-orientasi atas disorientasi oleh uang, kapital dan materi ke orientasi peradaban dengan melawan komoditisasi dan penjajahan serta pencerdasan kehidupan bangsa sebagai orientasi peradaban kesetaraan politis yang menghargai kemajemukan dan belajar hidup bersama dalam proses politis demokrasi.

Pemakalah ketiga, Dr. Leila Retna Kumala melihat, pendidikan akan melahirkan masyarakat terpelajar, berpengetahuan, yang mempunyai sifat-sifat otonom, bebas, emansipatif, dan menghargai kesetaraan serta pluralitas: watak yang menjadi pilar utama masyarakat madani. Oleh karena itu langkah yang

diperlukan antara lain adalah pemenuhan hak pendidikan pengajaran bagi warga negara tanpa diskriminasi dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan, agar bukan hanya semakin banyak warga negara (termasuk perempuan) yang terdidik melainkan juga muncul *critical mass* bagi pembentukan masyarakat madani.

Namun demikian, masih perlu dikembangkan indikator keberhasilan yang lebih tajam dari upaya-upaya di atas, antara lain dengan menggunakan indikator ‘*Gender Empowerment Measurement*’ dan ‘*Gender Related Development Index*’. Sejauh ini, pengukuran kinerja pembangunan umumnya dan pendidikan khususnya, hanya sampai pada *in-put*, proses dan maksimal *out-put*. Pada umumnya juga masih terbatas pada indikator kuantitatif. Sesungguhnya perlu diketahui juga indikator *out-come* pendidikan, karena dengan itu akan diketahui pengaruh faktor eksternal (misalnya media massa dan lingkungan masyarakat) yang dapat menghambat atau mendorong upaya pendidikan untuk mencapai masyarakat madani tersebut. Di samping itu indikator *in-put*, proses dan *out-put* yang telah ada masih perlu dipertajam, misalnya dengan mengaitkan mutu dan relevansi pendidikan, serta partisipasi masyarakat dalam manajemen pendidikan.

Pada sesi ini, muncul pernyataan-pernyataan dari sesama peserta seminar yang berbeda. Di satu pihak (Prof.Engkoswara?) menyebut bahwa pendidikan nasional kita sebenarnya telah maju, tetapi karena budaya bangsa terabaikan, maka kualitas manusianya menjadi rendah. Maka dari itu yang diperlukan bukan terutama paradigma (keberhasilan) yang baru melainkan perlunya revitalisasi budaya melalui pendidikan yang berfungsi sebagaimana semestinya. Di pihak lain, Prof. Dr.Suminto menyebut bahwa rekonstruksi dengan paradigma baru justru diperlukan dan mulai tergambarkan, tetapi pada sesi ini belum tergambarkan derivasinya pada paradigma keberhasilannya. Yang lebih terlihat pada sesi ini adalah upaya revitalisasi atas paradigma keberhasilan yang lama dan —dianggap benar— tapi masih terpendam. Prof. Suminto juga menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang bertanggung jawab terhadap undang-undang Sisdiknas yang baru, karena amanat undang-undang itu yang menyebutkan bahwa kurikulum dan evaluasi sebagiannya adalah wewenang guru, belum dilaksanakan pada penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional. Oleh karena itu diperlukan interaksi yang intens antara pemerintah dengan dewan guru, untuk mengembangkan sistem evaluasi yang komprehensif, tidak hanya evaluasi terhadap apa yang terjadi di kelas, melainkan mencakup aspek yang lebih luas. Misalnya, apakah dunia usaha dan masyarakat di luar sekolah telah ikut berperan dalam proses pendidikan, dan sebaliknya, apakah pendidikan di sekolah tentang disiplin dan toleransi benar-benar sebagai *life skill* yang diimplementasikan di luar sekolah. Peserta yang lain bahkan menyebutkan kurangnya buku-buku yang

tanggap terhadap paradigma pendidikan yang baru (misalnya *stereotype* peranan ibu, ibu masih 'selalu' memasak), dan lemahnya penteladanan yang juga sebagai pertanggung jawaban kepada Tuhan.

Prof. Conny sebagai pemakalah menggaris bawahi pernyataan-pernyataan di atas sebagai hal penting, bukan hanya karena diperlukan untuk memperbaiki pendidikan kita, melainkan juga untuk beradaptasi dengan tantangan global dan kecenderungan spiritualisasi, agar sebagai warga tidak 'terpelanting' dari akar budayanya sendiri dalam upaya mewarnai kewargaan global. Oleh karena itu paradigma keberhasilan haruslah mempertanyakan kehadiran watak-watak bermoral, berilmu, hidup dalam masyarakat secara demokratis dan dalam keseimbangan kepentingan-kepentingan. Romo Mudji mencoba memperdalam isu ini dengan menyebut arti penting 'pembatinan' yaitu pemahaman secara kritis dan mengakar tentang masalah-masalah aktual, bukan sekedar 'sosialisasi' yang justru cenderung mengarah kepada 'penularan' (kebodohan) pengetahuan dan 'indoktrinasi'.

## V. Manajemen Pendidikan dalam Konteks Nasionalisme dan Pluralitas di Era Globalisasi dan Desentralisasi

Ace Suryadi Ph.D dan Dr.Djisman Simandjuntak hadir untuk menguraikan tema ini. Pemakalah pertama, Ace Suryadi Ph.D, melihat bahwa tantangan utama manajemen pendidikan untuk mewujudkan masyarakat madani adalah dengan melakukan perubahan dan penyesuaian (demokratisasi) sistem pendidikan nasional, memperhatikan keberagaman dan mendorong partisipasi masyarakat.

Bertolak dari pengalaman (kegagalan) SD Inpres, pemakalah melihat bahwa masyarakat adalah pemilik sejati pendidikan (sekolah). Maka untuk strategi pendidikan nasional untuk mencapai masyarakat madani adalah *pertama*, dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas pendidikan. Pendidikan adalah ruang publik yang harus dimiliki seluruh warga sebagai prasarat menuju masyarakat madani. *Kedua*, jaminan kesempatan memperoleh pendidikan bagi warga, yang sekarang lebih bermakna kuantitatif, harus berubah ke arah kualitatif: jaminan semua warga (termasuk yang miskin) untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. *Ketiga*, pluralitas sebagai kekuatan yang besar bila dikelola dengan baik akan melahirkan kemandirian dan kreatifitas serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan.

Paket kebijakan desentralisasi pendidikan (tiga lapis) merupakan strategi untuk mendorong pendidikan menuju masyarakat madani tersebut. *Pertama*, desentralisasi pemerintahan bidang pendidikan bertujuan memberdayakan potensi daerah yang beranekaragam untuk meningkatkan

efektifitas dan mutu pelayanan, karena orang daerahlah yang paling tahu masalah dan kebutuhan mereka sendiri. *Kedua*, desentralisasi pada satuan pendidikan yaitu kemandirian dan profesionalisasi satuan pendidikan (sekolah). *Ketiga*, desentralisasi (otonomi) di tingkat pengelola dan pelaksana pendidikan di sekolah. Ketiga upaya di atas menempatkan masyarakat sebagai ‘pemilik sejati pendidikan’, yaitu sumber inspirasi, sasaran sekaligus sumber dana pendidikan. Maka untuk mengaktualisasikannya, pemerintah memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga masyarakat yang dibentuk untuk mengontrol, memberi masukan, dukungan dan mediasi antara sekolah dan masyarakat.

Paket kebijakan desentralisasi tiga lapis ini menghadapi tiga masalah kesenjangan di lapangan: gejala kesenjangan antara (kepentingan) daerah dan sekolah yang terlihat pada resentralisasi (dana operasional pendidikan yang semula telah berada di tingkat sekolah) ke tingkat daerah, kesenjangan kemampuan SDM antar daerah dan kesenjangan (perlakuan) terhadap sekolah negeri dan sekolah swasta.

Langkah yang perlu dan sedang diambil untuk lebih mendorong demokratisasi pendidikan ini adalah dengan penguatan penyelenggaraannya di ‘akar rumput’ yaitu upaya ‘*capacity building*’ sekolah-sekolah termasuk dengan meningkatkan partisipasi (politik) masyarakat pada penyelenggaraan sekolah. *Capacity building* bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sekolah untuk mengurus dan mengatur penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui *school based management*. Oleh karena kemampuan sekolah berbeda-beda, maka *capacity building* yang dilakukan pun berbeda-beda. Sekolah dengan tingkat pra-formal (belum memenuhi standar teknis) dilengkapi fasilitas minimalnya, tingkat formal (telah memenuhi standar minimal) ditingkatkan kemampuan administratif dan paedagogisnya, agar mampu meningkatkan *out-put* (seperti penurunan putus sekolah dan mengulang serta meningkatkan tingkat lulusan dan melanjutkan) dan agar meningkat ke tahap transisional, yaitu mampu memberikan pelayanan pendidikan minimal yang bermutu, dan mulai mendayagunakan sumber-sumber kependidikan secara optimal, termasuk menggalang dana masyarakat. Sekolah yang berada pada tahap transisional ini ditingkatkan kemampuan profesionalitasnya dalam menyelenggarakan pendidikan, sehingga otonom, yaitu tidak hanya mampu secara mandiri memberikan pelayanan di atas Standard Pelayanan Minimal, melainkan juga dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada *stakeholders*. Upaya demokratisasi pendidikan, menurut pemakalah, adalah keniscayaan, bukan hanya untuk memenuhi tuntutan ke dalam, melainkan juga untuk memperkuat posisi dalam persaingan global, karena keunggulan dalam persaingan global bukan

ditentukan oleh pemerintah yang kuat, melainkan oleh masyarakat yang diberdayakan.

Pemakalah kedua, Dr. Djisman Simanjuntak, membahas manajemen pendidikan dengan beranjak dari dialektika: realitas lima tahun ke belakang dan ke depan dari perubahan besar terutama di bidang teknologi kompleks yang tengah berlangsung di dunia (tesis), berhadapan dengan realitas masalah Indonesia sekurun dan upaya perubahan manajemen strategis pendidikan Indonesia (sebagai antitesis) agar tercipta manusia 2030: cerdas, ulet, tegar, gemilang (sebagai sintesis). Capaian dunia maju yang telah bergerak jauh di depan disaksikan oleh Indonesia yang masih terjebak dalam masalah-masalah yang bersifat elementer: buta huruf, kemiskinan, pengeluaran rendah untuk investasi pendidikan, permintaan rendah dunia industri terhadap pendidikan mutu tinggi, *return* rendah investasi pendidikan tinggi karena persaingan karir yang kalah dari *merit* akademik oleh kolusi-korupsi dst dan juga masalah penting—manajemen pendidikan/sekolah yang masih berorientasi produk yang dapat diberikan, bukan produk yang dibutuhkan masyarakat. Dari pola pikir dialektika semacam itu tersirat anggapan bahwa pendidikan sangat penting untuk mengejar ketertinggalan, tetapi agar terjadi akselerasi tinggi mengejar ketertinggalan, diperlukan perubahan pendidikan yang tidak hanya tambal-sulam (*incremental*) melainkan perubahan metamorfosis atau bahkan mutasi.

Akselerasi tinggi ini memerlukan tiga hal utama: *pertama*, masukan yang juga tinggi/besar, dari rumah tangga, negara dan masyarakat dan dunia usaha. *Kedua*, manajemen sekolah yang tanggap: perlakuan terhadap ikhtiar pendidikan sebagai manajemen layanan mulia (*merit goods*) harus diganti dengan manajemen modern. Orientasi sekarang yang menekankan pada produk yang dapat diberikan sekolah harus segera diganti dengan orientasi kebutuhan masyarakat pengguna. Kurikulum yang gemuk perlu diperamping agar lebih fokus sehingga dana, daya dan waktu dapat direlokasi untuk peningkatan mutu dan pemerataan. *Ketiga*, orientasi yang terlalu kuat kepada birokrasi (yang ternyata bergerak lamban) dan pemimpin kuat harus segera diganti dengan orientasi keswadayaan dan otonomi sekolah. Dengan orientasi baru itu, penggerak *perubahan* pendidikan Indonesia yang dapat diandalkan adalah masyarakat kewargaan (*civil society*) dan dunia usaha. Oleh karena itu peran pemerintah yang diperlukan adalah pelaksanaan kewajiban Konstitusi oleh pemerintah untuk membiayai pendidikan dan memberikan kelonggaran kebijakan sehingga ramah bagi investasi oleh dua pihak di atas.

Pada sesi ini kurang berkembang pertanyaan-pertanyaan apalagi pernyataan yang menimbulkan diskusi yang relevan. Padahal perubahan orientasi sekolah yang diusulkan Dr. Djisman Simanjuntak agar lebih berorientasi kepada kebutuhan pengguna dapat berakibat pada instrumentasi sekolah menjadi alat

ekonomi belaka. Apabila kebutuhan masyarakat adalah kepentingan yang semata-mata pragmatik diikuti, maka harkat manusia dapat ter-reduksi dan nilai-nilai universal non-pragmatik serta ideologi negara terabaikan oleh ikhtiar pendidikan. Di samping itu isu 'kewajiban Konstitusional bagi negara untuk membiayai pendidikan' kurang ditekankan oleh pembicara, padahal nilai investasi pada pendidikan tak tertanggung lagi oleh masyarakat, sehingga nampak sosok aneh pendidikan: sebagai urusan publik tetapi pemecahannya lebih banyak oleh pribadi dan keluarga (*public issue with private solution*). Namun demikian, pada lokakarya muncul rumusan yang penting, antara lain: Paradigma sinergi antara masyarakat dan pemerintah perlu dikembangkan dalam manajemen pendidikan, sehingga perlu *capacity building* yang sistematis dan terprogram bagi daerah dan satuan sekolah. Perlu dikembangkan kerja sama lintas sektor dengan penekanan partisipasi masyarakat dan pembagian hak-kewajiban yang jelas antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat (al. Pusat merumuskan standar pendidikan nasional dalam rangka pelayanan yang adil dan merata. Daerah menetapkan standar lokal yang benar dan relevan dengan situasi dan kebutuhan daerah. Pemerintah perlu konsisten melakukan fasilitasi dan evaluasi (keberhasilan dan akuntabilitasnya). Perlu optimalisasi peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah untuk mengurangi intervensi birokrasi. Masyarakat/satuan pendidikan berhak menentukan instrumen secara kreatif melalui manajemen berbasis sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Perlu peraturan perundangan yang mendinamisasi, bukan membelenggu masyarakat.

## **VI. Proses Pendidikan dalam rangka Memberdayakan dan Memberadabkan Masyarakat**

Hadir tiga pemakalah yaitu Dr.H.Arief Rachman M.Pd, Prof.Dr. Paulus Wirutomo M.Sc, dan Dr.Dewi Fortuna Anwar MA.APU untuk menguraikan tema di atas. Pemakalah pertama, Dr.H.Arief Rachman M.Pd, melihat ironi paedagogis dari realitas pembelajaran di sekolah yang seakan-akan terpisah dengan masyarakatnya, sehingga anak didik lebih mampu menghafal nilai-nilai daripada mengimplementasikan apalagi mengkritisi, padahal pendidikan mengemban tanggung jawab untuk menciptakan kultur masyarakat sehingga terwujud masyarakat madani: masyarakat bermoral, beradab, mengedepankan norma dan hukum, berilmu, demokratis (bebas bertanggung jawab), modern (*up-to-date*), seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah pendidikan di Indonesia telah mengacu pada tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab pendidikan seperti itu, menurut pemakalah adalah mungkin dilaksanakan, karena pendidikan merupakan pusat kemajuan bagi masyarakat, pemegang sahamnya adalah seluruh rakyat-bangsa

dan sektor pembangunan serta persoalan (pendidikan) yang ada dapat didekati melalui beragam persepektif.

Namun demikian, realitas pembelajaran di sekolah dan di masyarakat pun masih belum selaras dengan panggilan tanggung jawab tersebut. Di sekolah, tantangan tanggung jawab itu begitu banyak, antara lain: terkesampingkannya ranah afektif dan psikomotor, evaluasi yang kurang konvergen, tereduksinya pendidikan menjadi pengajaran sehingga kurang relevan dengan dunia kerja, 'menara gading' lembaga pendidikan akibat upaya penguasaan atas pengetahuan yang dilakukan tidak disertai pembaharuan dan kontekstualisasi dengan masyarakat, *status oriented* peserta didik, buku yang bercorak monodimensional sehingga kurang berimbang antara teori-praktek, iptek-imtaq dll, *state oriented* pertanggung jawaban pendidikan, penekanan guru sebagai 'produsen' melebihi bobot 'profesi' kemanusiaannya, dan lemahnya dukungan logistik.

Oleh karena itu realitas proses pembelajaran di sekolah dengan gambaran seperti itu harus segera diselaraskan, antara lain melalui:

- 1) Penciptaan kultur berlandaskan moral, budaya, empiri dan argumen ilmiah dengan pola pikir konvergen;
- 2) Penciptaan atmosfir keterpelajaran, yaitu sikap ilmiah, eksploratorik, kritis dan hipotetis;
- 3) Peningkatan ketrampilan mengingat, membaca, menulis dan komunikasi;
- 4) Materi didik dengan landasan pengetahuan dasar yang umum dan pengembangan pengetahuan lanjutan yang spesifik-profesional, tanpa merendahkan salah satu bidang;
- 5) Perlunya materi HAM, gender, pengentasan kemiskinan dan cara hidup sehat.

Di masyarakat, realitas yang kurang selaras antara lain adalah terdapat sikap-sikap mental yang menghambat pendidikan, seperti cepat puas dan mengeluh, mencari kambing hitam, berfikir dikotomis, kehilangan identitas diri bangsa dan materialistik. Oleh karena itu perlu proses pembelajaran yang:

- 1) Mempertimbangkan spiritualitas, emosionalitas, intelektualitas, sosial dan kebudayaan;
- 2) Menyeimbangkan aktualisasi potensi otak kanan dan otak kiri;
- 3) Mempertimbangkan potensi logika, etika dan estetika;
- 4) Mengembangkan manajemen kelas yang mendidik disiplin dan menumbuhkan kreatifitas;
- 5) Menciptakan kurikulum yang membuka ruang berkreasi, menemukan gagasan baru dan bermanfaat;

- 6) Mendekatkan anak kepada dunia nyata yaitu masyarakat sebagai sumber pembelajaran;
- 7) Mengevaluasi pendidikan atas siswa yang diproyeksikan pada tujuan pendidikan.

Untuk merespon tuntutan perubahan di atas, maka sekolah harus mampu:

- 1) Menjadi sumber daya masyarakat sepanjang hayat;
- 2) Mampu mengidentifikasi kebutuhan dan melayani siswa dan orangtua;
- 3) Melayani keragaman kecerdasan dan cara belajar;
- 4) Meningkatkan mutu guru, termasuk menggunakan tehnik dan media teknologi masa depan;
- 5) Menjadikan semua orang guru sekaligus murid;
- 6) Mampu memobilisasi sumber masyarakat sehingga semua pihak mempunyai andil keberhasilan sekolah;
- 7) Mempunyai kurikulum yang implementatif dan sistem penilaian yang sesuai.

Sedangkan guru haruslah mempunyai karakteristik mencintai anak, membantu, penuh senyum dan kejutan, menjaga kebaikan bersama, cemerlang, sungguh-sungguh, riang dan mendengar dari hati ke hati.

Dengan perubahan-perubahan di atas maka diharapkan pendidikan dapat memberikan sumbangan bagi terciptanya **karater masyarakat madani: maju, mandiri, makmur, adil, bijaksana, kental keagamaannya, merdeka dan tanggung jawab, teratur dalam berfikir dan bekerja, produktif dan optimal dalam memberdayakan diri.**

Pemakalah kedua, Prof.Dr. Paulus Wirutomo M.Sc, berangkat dari refleksi sosiologis atas perkembangan sosial-budaya masyarakat Indonesia yang sedang mengalami krisis multi dimensi tetapi sekaligus belajar atas kondisi yang dihadapinya. Kenyataan mendasar yang menjadi bukti krisis itu adalah adanya kesenjangan yang terus melebar antara *'ideal values'* yaitu nilai yang dijunjung dengan *'actual values'* yang menjadi pedoman hidup sehari-hari. Keadaan ini memberikan petunjuk tentang adanya kemacetan peran agen-agen sosialisasi nilai (keluarga, sekolah, lembaga agama, komunitas) dan kondisi struktural yang tidak memungkinkan berkembangnya nilai ideal itu di dalam kehidupan (sistem politik yang tidak akuntabel, konflik kelompok, oligarkhi, pengangguran, krisis hukum, dst). Bagaimana dengan kondisi sosial dan politik seperti itu, kita dapat menuju "masyarakat adab" melalui pendidikan, terutama sekolah? Yaitu masyarakat (yang menurut Etzioni, 1993), memprioritaskan hukum, perlindungan terhadap keluarga, pendidikan moral di sekolah,

solidaritas, mengutamakan kehidupan masyarakat dan tanggung jawab sosial, serta kekitaan komunitarian, tanpa terperosok jatuh ke dalam titik yang ekstrem.

Pemakalah ini melihat sekolah di Indonesia dalam keadaan lemah untuk mengemban tugas seperti itu. Sebabnya, al. kurangnya logistik, penonjolan ilmu melebihi nilai etika dan estetika, lemahnya mekanisme ganjaran-hukuman, rendahnya status guru, buruk/lemahnya 'budaya sekolah' (*school culture*) yang lebih menyiratkan 'jual-beli' daripada asah-asuh, lemahnya pengembangan *hidden curriculum* dalam sistem sosial di sekolah, kurangnya keterlibatan faktor di luar sekolah serta sempitnya ruang sosial dan kultural di sekolah bagi pengembangan kreativitas dan sportivitas siswa.

Oleh karena itu peran sekolah harus dibenahi, baik faktor logistik (APBN-APBD) maupun non-logistiknya. Yaitu:

- 1) Penguatan sistem ganjaran-hukuman;
- 2) Pengembangan *school culture* yang tidak artifisial, melengkapi kurikulum formal dengan *hidden curriculum* yang mengandalkan pola interaksi yang manusiawi, disiplin, demokratis, kreatif, menciptakan kerukunan. Di sarankan agar pendidikan agama (*cognitive*) diganti menjadi 'pendidikan beragama' (*affective education*), sedangkan pendidikan keimanan dan ketakwaan lebih baik diserahkan pada jalur informal dan non-formal;
- 3) Sekolah perlu mengembangkan semua potensi kecerdasan siswa, bukan hanya kecerdasan ilmiah;
- 4) Untuk menunjang fungsi pendidikan dan pengajaran dari sekolah, studi pendidikan harus dilengkapi studi-studi mikro yang dapat menafsirkan dan mengungkap masalah lembaga sekolah menyangkut (upaya) pengembangan nilai-nilai siswa.

Pemakalah ketiga, Dr.Dewi Fortuna Anwar MA.APU, melihat dari perspektif politik pendidikan dan pendidikan politik dan menunjukkan betapa sulitnya menemukan formula pendidikan yang tepat untuk membangun masyarakat madani. Pertama, karena terdapat hubungan antara masyarakat dan negara yang dilematis menyangkut peran masing-masing, termasuk dalam pengelolaan pendidikan. Kedua, menyangkut pilihan peran yang harus dimainkan pendidikan: pencerahan agar seseorang beradab ataukah pengembangan ketrampilan agar seseorang bermartabat. Persoalan pertama memperlihatkan bahwa di satu pihak, masyarakat madani sendiri ditandai dengan kemampuannya menyelesaikan persoalan mereka sendiri tanpa bergantung kepada negara, kebebasannya menentukan wacana dan kemampuan membatasi kekuasaan negara. Tetapi, di pihak lain, negara dianggap (dapat?) berperan penting membangun masyarakat seperti itu melalui pendidikan; karena dengan pendidikan yang diperoleh, masyarakat tidak hanya dapat menjadi beradab dan

santun, tetapi juga mampu memahami, mengorganisir serta memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya, termasuk terhadap upaya monopoli kekuasaan oleh pemerintah.

Persoalan kedua memperlihatkan pilihan peran yang seharusnya dimainkan oleh pendidikan: pencerahan untuk pemberadaban ataukah pengembangan ketrampilan untuk peningkatan martabat. Belajar dari kasus di Amerika Serikat, pendidikan untuk pencerahan –pemberadaban melahirkan dua varian: pendidikan (publik) sebagai kekuatan pembentuk masyarakat bangsa dari migran yang fragmentaris (horizontal -Webster) dan sebagai kekuatan pencerah masyarakat untuk menjalankan peran kontrol terhadap negara (vertikal-Jefferson). Varian Websterian menyisakan ruang bagi hegemoni negara manakala pilihan nilai yang diberikan pendidikan berdampak melanggengkan kekuasaan.

Aliran pendidikan untuk pengembangan ketrampilan dan martabat menguat, terutama setelah dipahami bahwa pertumbuhan (ekonomi dan) kelas menengah adalah faktor penentu pembentukan demokrasi dan masyarakat madani. Kendati demikian, kausalitas yang tidak linier dan tidak permanen antara pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan masyarakat madani kemudian melahirkan kritik terhadap penekanan pada pendidikan *industrial* seperti ini. Bahkan “pendidikan untuk *human capital formation*” ini kemudian dianggap anti-demokrasi. Pendidikan seperti ini melestarikan posisi kelas bawah pada posisinya, dan tidak memungkinkan mereka mempunyai pengetahuan dan kemampuan mengorganisasi diri untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ternyata aliran seperti itulah yang nampaknya dikembangkan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahkan di Indonesia, oleh Orde Baru aliran ini dikawinkan dengan varian Websterian yang terbuka bagi kemungkinan pendidikan nilai (P4) untuk melanggengkan kekuasaan.

Berangkat dari pengalaman di atas, lalu pendidikan seperti apa yang tepat untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia? Apapun pilihannya, bagi pemakalah, tiga faktor harus diperhatikan: pertama, aspek praktis pendidikan untuk *human capital* yang dapat mensejahterakan masyarakat harus dipelihara, karena masyarakat madani dan demokrasi hanya akan berkembang pada masyarakat yang sejahtera. Kedua, anak didik perlu diberi *liberal education* yang dapat meningkatkan wawasan dan kemampuan untuk analisis dan interaksi sosial, baik horizontal maupun vertikal. Ketiga, anak didik perlu dibekali pendidikan moral dan etika yang bertujuan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan.

Pada sesi ini, waktu yang tersedia tidak cukup untuk terjadinya diskusi. Namun demikian, pada sesi lokakarya, muncul kesepakatan tentang perlunya rumusan formal karakteristik masyarakat madani Indonesia beserta indikatornya

dan perlunya membenahan proses pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Pembenahan di keluarga meliputi perlunya sistem pengasuhan yang demokratis dan berwawasan gender, dan pengembangan anak sesuai minat bakat dan kemampuan intelektual masing-masing. Pembenahan di sekolah meliputi orientasi kurikulum agar mengacu pada masyarakat madani, *civic education* yang kontekstual, *life skills*, *living values*, perubahan sistim penghargaan dan hukuman, pemanfaatan berbagai sumber pembelajaran, mengembangkan ranah non-kognitif, dan strategi pembelajaran yang variatif, kontekstual dan dialogis. Di samping itu perlu ditekankan pada *learning how to learn*, pengembangan budaya sekolah dan pendekatan pembiasaan, pembelajaran dan peneladanan. Di masyarakat, perlu dikembangkan kemampuan partisipasi melalui institusi formal dan informal dan pendidikan masyarakat yang menekankan *social capital* dan pendidikan moral.

## VII. Evaluasi Pendidikan yang Komprehensif dengan Mengacu pada Tujuan Pendidikan

Tiga pemakalah, yaitu Prof.Dr.H.Toeti Sukamto, Dr. Achmad Subianto dan Bahrul Hayat Ph.D memberikan pandangan tentang evaluasi pendidikan yang tepat untuk mengembangkan masyarakat madani. Pemakalah kedua, Dr. Achmad Subianto, mencoba menggali dasar-dasar evaluasi pendidikan sehingga agaknya tepat ditempatkan di awal bagian ini. Bagi pemakalah ini, landasan pokok yang harus menjadi pegangan evaluasi adalah bahwa pendidikan adalah untuk membangun jati diri bangsa Indonesia, sekurang-kurangnya berlandaskan hakekat dan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang telah ditetapkan oleh *founding fathers* bangsa. Dalam pandangannya pendidikan adalah untuk menyiapkan manusia Indonesia yang mampu mengemban amanah memakmurkan dunia. Oleh karena itu evaluasi pendidikan bermakna pula sebagai usaha pembinaan atas ikhtiar manusia baik sistemik maupun individual yang harus diarahkan ke sana. Tujuan evaluasi pendidikan dengan demikian adalah: pertama, untuk melihat capaian upaya pendidikan sesuai tujuan bersama, yaitu menjadi manusia dengan jati diri bangsa. Kedua, menyelamatkan manusia Indonesia. Ketiga, menata kembali pendidikan Indonesia. Keempat, menjadikan Indonesia sebagai negara dan bangsa berkelas. Kelima, menciptakan bangsa yang jujur, adil, bersih, sehat dan benar.

Secara khusus, untuk mengevaluasi capaian pendidikan haruslah diarahkan kepada dua hal: yaitu kepada keadaan/capaian institusi pendidikan sebagai *living thing* dan kepada manusia (didik) yang belajar. Untuk mengevaluasi capaian institusi pendidikan harus dilihat beberapa aspek: perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), perangkat sdm

(*brainware*), perangkat organisasi (*organware*) dan perangkat waktu (*timeware*). Tolok ukurnya adalah apakah lembaga pendidikan itu semakin berdaya atau sebaliknya, semakin bergantung pada faktor eksternal. Sebagai ‘sesuatu yang hidup’ seharusnya tumbuh, tetapi kadang-kadang institusi pendidikan juga mengalami ‘ketertinggalan’ pada beberapa perangkatnya. Oleh karena itu perlu dilihat capaian institusi itu melalui evaluasi tahapan hidup (*life cycle*) dari segi :*organizational life cycle*, *management life cycle*, *business life cycle* dan *technological life cycle*. Dari evaluasi itu dapat diambil langkah-langkah perbaikan kelembagaan, melalui reposisi, restrukturasi, reorganisasi, revitalisasi dst. Salah satu hal yang ditekankan untuk revitalisasi adalah bahwa sekolah haruslah mempunyai *school culture*, minimal dengan budaya dasar sekolah, yaitu: *trust, consistent and care*. Oleh karenanya perlu dievaluasi keberadaan budaya dasar sekolah itu di sekolah-sekolah.

Di pihak lain, untuk melihat keberhasilan pendidikan dalam mengembangkan manusianya, hendaklah diukur dari perkembangan pemenuhan kebutuhan dasar yang *humane*, bukan hanya kebutuhan fisik untuk pemenuhan kodrat hewaniyah saja, melainkan juga kebutuhan kodrat manusiawi, yaitu pengetahuan untuk mengembangkan aspek-aspek dirinya, (Al-Baqarah 2:31)

- 1) Aspek kecerdasan intelektual
- 2) Aspek kecerdasan emosional
- 3) Aspek kecerdasan spiritual

Dengan kata lain, pembinaan dan evaluasi sumber daya manusia Indonesia adalah pembinaan/evaluasi budaya, ketrampilan, pengetahuan, kebangsaan, dan ketakwaan. Pembiasaan yang ditempuh sebagai budaya pelajar oleh karenanya adalah budaya doa, baca, tulis, pikir, bicara, kerja dan tidak menganiaya diri sendiri. Evaluasi atas proses pembelajaran perlu diarahkan pula pada praktek budaya di atas. Bagi pemakalah, prinsip dasar yang harus dipegang untuk keberhasilan (ikhtiar, evaluasi dan dievaluasi) adalah ‘mulai dari nol’, yaitu tanpa prasangka, jujur, menerima resiko dinilai nol/rendah, siap memulai dari nol (membuang sistem dan cara lama yang gagal dst), berusaha membangun kembali dengan *zero defect (learn and be the best)*, dan berusaha ‘bersama’ (*zero ego(?)*, *let’s get on board*).

Pemakalah berikutnya, Prof.Dr.H.Toeti Sukamto, melihat bahwa evaluasi merupakan komponen yang sangat krusial di dalam proses belajar mengajar dan berdampak pada mutu lulusan hasil pendidikan. Dengannya guru dan siswa (dan pengambil keputusan) dapat melakukan koreksi sekaligus mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan telah /belum tercapai. Karena tujuan pendidikan mencakup tiga ranah –kognitif, afektif dan psikomotor, maka

evaluasi harus mencakup ketiganya. Untuk itu perlu instrumen yang relevan; misalnya tes untuk evaluasi kognitif, observasi untuk evaluasi psikomotor dan kusioner untuk evaluasi afektif. Instrumen-instrumen itu haruslah valid dan reliabel. Kelemahan yang umum terjadi adalah bahwa evaluasi afeksi kurang dilakukan karena jumlah siswa yang cukup besar dan secara teknis sulit dilakukan, tetapi menyangkut aspek penting dari tujuan pendidikan, misalnya masalah moral. Aspek yang juga penting dalam evaluasi untuk memberikan kesiapan kepada siswa adalah transparansi: bahwa siswa harus mengetahui aspek yang dievaluasi, bagaimana cara guru mengevaluasi dan hasil evaluasi.

Sejauh ini UAN digunakan sebagai cara evaluasi untuk mengetahui gambaran keberhasilan pendidikan di Indonesia. Namun demikian UAN masih mengundang pertanyaan, terutama menyangkut ketidakseragaman kategori antar-daerah, ketidakseragaman materi /bahan ajar, kepantasan alokasi waktu pada masing-masing soal, dan dasar yang dipakai untuk menentukan ambang batas kelulusan.

Pemakalah ketiga, Bahrul Hayat Ph.D, mengawali uraiannya dengan menyebutkan prinsip penilaian yaitu komprehensif dan otentik, *multiaspect-multimethod*, berkelanjutan dan seimbang antara evaluasi internal dan eksternal. Sedangkan sistem yang diterapkan untuk penilaian pendidikan adalah penilaian berbasis kelas, ujian kelulusan sekolah, survey pendidikan, akreditasi/penjaminan mutu, dan tes kemampuan dasar, dst.

Penilaian berbasis kelas mencoba mengetahui kemajuan belajar, mengetahui tingkat ketuntasan, komprehensif (menilai kognitif, afektif dan psikomotorik), berkelanjutan, berbentuk penugasan dan ulangan, serta sebagai bahan pengisian raport dan kenaikan kelas. Sedangkan ujian kelulusan sekolah dilakukan diakhir jenjang pendidikan, berfungsi bagi sertifikasi dan *quality control* lulusan, bersifat keharusan bagi setiap siswa, mengacu pada stándard lulusan (nasional/lokal), berbentuk tes tulis dan praktek serta dilakukan baik oleh sekolah maupun pihak eksternal.

Di pihak lain, survey mutu pendidikan bertujuan memantau kinerja sistem makro, perbandingan antar daerah, wilayah atau negara, menjadi umpan balik kebijakan, bersifat sampel (populasi, kelas atau bidang tertentu) dan berkala, dan berperan untuk *benchmarking*. Akreditasi/penjaminan mutu dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan dan sertifikasi lembaga/program, bersifat sensus dan wajib, komprehensif (dari *in-put*, proses, ke *out-put*), memberikan umpan kepada lembaga/program, dan dilakukan oleh lembaga eksternal. Sedangkan tes kemampuan dasar bertujuan mendiagnosa/penempatan, memantau perkembangan hasil belajar, menilai kemampuan/ketrampilan dasar siswa, bersifat sensus dan tahunan, pada tingkat kelas tertentu sesuai kebutuhan.

Pada sesi seminar, pertanyaan yang diajukan umumnya lebih bersifat mencari kejelasan. Tetapi pada lokakarya, berkembang pemikiran yang tidak hanya mencoba merevitalisasi, melainkan juga bersifat kritik dan reformatif. Disepakati bahwa secara sistemik tujuan pendidikan (di) sekolah adalah terciptanya siswa unggul, kompeten, memiliki jati diri, bermoral dan berbudaya yang pada gilirannya berdampak positif pada terbentuknya masyarakat madani. Namun sistem evaluasinya sampai sekarang dinilai kurang begitu baik: dilihat dari kebutuhan untuk mengetahui secara jelas gambaran hasil belajar siswa (*output*), gambaran kelemahan sistem (*in-put* yaitu kurikulum, sarana-prasarana, guru, biaya dan proses yaitu pembelajaran dan manajemen) dan kepentingan untuk mengetahui gambaran *out-comes*-nya yaitu sumbangan luaran sekolah pada pembentukan masyarakat madani.

Gambaran hasil belajar siswa atau tingkat keterdidikan siswa sebagai manusia yang utuh, terutama aspek psikomotor dan afektif yang menyangkut nilai spiritual, religiusitas, emotif, kreatifitas, etika moral dan budaya, masih belum (cukup) terpaparkan oleh evaluasi yang ada. Padahal aspek-aspek itu sangat penting untuk membangun masyarakat madani. Ketidak-utuhan evaluasi ini diduga juga berhubungan dengan ketidakjelasan atau ketidak-utuhan makna/pemaknaan atas kurikulum berbasis kompetensi.

Peserta lokakarya menegaskan perlunya kejelasan makna kompetensi dan stándard minimum kompetensi yang harus dikuasai siswa, antara lain menyangkut apa materi yang paling esensial. Proses pembelajaran juga belum dipaparkan dengan jelas oleh evaluasi yang ada, karena belum menggambarkan apakah proses yang terjadi semata-mata transfer ilmu dan nilai seperti menabung uang di bank ataukah telah mengarah kepada transformasi ilmu, dan pengembangan nilai melalui interaksi yang konstruktif antara warga sekolah. Evaluasi tentang proses seharusnya (tetapi belum) —menilai sekolah sebagai institusi, khususnya untuk memaparkan budaya interaksi sosial dan *hidden curriculum* di sekolah, yaitu apakah membangun solidaritas-kerja sama, demokratis, egaliter (termasuk berkesetaraan gender) dst. Gambaran tentang efektifitas dan efisiensi dari sarana-prasarana dan pembiayaan juga belum diberikan secara jelas oleh evaluasi yang ada. Peserta seminar menekankan perlunya prioritas evaluasi diarahkan pada ketersediaan sarana-prasarana yang esensial dan tingkat pemanfaatannya. Sedangkan evaluasi terhadap guru harus menekankan pada aspek model/teladan, keterbukaan dan kemampuan membangun watak siswa serta kreatifitasnya untuk memanfaatkan sumber pembelajaran yang tersedia.

Di samping aspek yang dievaluasi kurang lengkap, validitas dan reliabilitas metode-metode yang digunakan dalam evaluasi 'terbatas' itu pun masih dipertanyakan, sementara kegunaannya untuk mengambil kebijakan baru

masih kurang memadai, karena kekurangan data kualitatif, terutama di tingkat daerah. Oleh peserta lokakarya, posisi penilai yang merangkap sebagai penyelenggara (departemen, dinas dan sekolah) yang tidak menyertakan penilai independen dan (calon) pengguna pendidikan dalam evaluasi, juga dianggap menyisakan masalah bukan hanya kredibilitas, melainkan juga masalah hak masyarakat dan relevansi pendidikan.

Dari uraian di atas, peserta lokakarya melihat bahwa pertama, sistem evaluasi pendidikan yang ada tidak lagi memadai untuk melihat kesiapan dan hasil capaian sekolah, —apalagi untuk melihat dampaknya di luar sekolah— dilihat dari tujuan pendidikan untuk menciptakan masyarakat madani. Kedua, kritik atas sistem evaluasi yang ada dan hal-hal yang secara normatif diutarakan di atas adalah penting untuk revitalisasi dan rekonstruksi sistem evaluasi agar relevan dan responsif secara sosial politik dengan tuntutan pengembangan masyarakat madani.

### **VIII. Rekomendasi Untuk Upaya Rekonstruksi dan Revitalisasi Pendidikan Indonesia Menuju Masyarakat Madani**

#### **A. Visi-Misi Pendidikan Indonesia**

- 1) Perlu rumusan formal karakteristik masyarakat madani Indonesia beserta indikatornya;
- 2) Perlu dirumuskan secepatnya visi pendidikan Indonesia sepuluh atau dua puluh tahun kedepan yang menekankan keseimbangan antara pengembangan kesejahteraan social-ekonomi (martabat), kemampuan analisis dan interaksi sosial (horizontal maupun vertikal) (harkat) serta moral-etika untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan (adab) dan agar diketahui bersama kemana manusia Indonesia akan dibawa melalui pendidikan;
- 3) Visi tersebut perlu dirumuskan berdasarkan kajian tentang kondisi riil komunitas/daerah;
- 4) Perumusannya harus bersifat cultural bukan politis, sehingga muncul proses pembatinaan nilai;
- 5) Perlu upaya pembentukan *nation building* yang lebih proporsional antara pusat dan daerah, dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal;
- 6) Pendidikan perlu dirumuskan, dikelola dan dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai integritas, hati nurani dan kompetensi.

## **B. Manajemen Pendidikan**

- 1) Perlu semakin ditumbuh kembangkan paradigma sinergi masyarakat dan pemerintah dalam manajemen pendidikan untuk melawan apriori masing-masing.
- 2) Perlu *capacity building* dilakukan secara terprogram dan sistematis terutama terhadap daerah dan satuan pendidikan.
- 3) Perlu kerja sama lintas sektor dan stakeholder dalam pengembangan manajemen pendidikan dengan penekanan pada perluasan partisipasi masyarakat.
- 4) Perlu pembagian hak-tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat di dalam satuan pendidikan.
  - a. Pusat berkewajiban merumuskan standar pendidikan secara nasional, dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang lebih adil dan merata kepada seluruh masyarakat;
  - b. Daerah berkewajiban menetapkan standar lokal yang relevan dengan situasi dan kebutuhan daerah tersebut melalui kajian yang benar.;
  - c. Masyarakat dan satuan pendidikan berhak menentukan instrumen secara kreatif untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan konsep Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah.
- 5) Dalam menetapkan aturan dan kebijakan pendidikan, pemerintah perlu secara konsisten melakukan fasilitasi serta pengkajian tingkat keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaannya.
  - a. Perlu optimalisasi peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga intervensi birokrasi menjadi berkurang;
  - b. Perlu Peraturan Perundang-undangan yang tidak membelenggu, melainkan mendinamisasikan masyarakat.

## **C. Proses Pendidikan Dalam Rangka Memberdayakan dan Memberadabkan Masyarakat**

- 1) Diperlukan format masyarakat madani Indonesia dan indikatornya yang lebih perasional;
- 2) Diperlukan pembenahan proses pendidikan pada lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat;
- 3) Pada lingkungan keluarga diperlukan;
- 4) Sistem pengasuhan yang demokratis dan responsiv gender;
- 5) Pengembangan pendidikan anak sesuai dengan potensinya (minat, bakat, kemampuan intelektual);

6) Pada lingkungan sekolah diperlukan

- a. Kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan melayani keragaman kecerdasan dan cara belajar
- b. Kurikulum yang berorientasi pada karakteristik masyarakat madani a.l.
  - *civic education* yang kontekstual
  - *life skills education*
- c. *Living values* (yang universal dan local, materi HAM, gender, pengentasan kemiskinan dan cara hidup sehat)
- d. Kurikulum yang membuka ruang berkreasi, menemukan gagasan baru dan bermanfaat
- e. Penciptaan kultur sekolah berlandaskan moral, budaya, empiri dan argumen ilmiah dengan pola pikir konvergen.
- f. Penciptaan atmosfir keterpelajaran, yaitu sikap ilmiah, eksploratorik, kritis dan hipotetis
- g. Penguatan sistem ganjaran dan hukuman
- h. Pemanfaatan dan mobilisasi berbagai sumber daya sehingga semua pihak mempunyai andil dalam keberhasilan.
- i. Evaluasi pendidikan atas siswa yang diproyeksikan pada tujuan pendidikan
- j. Bahan dan proses pembelajaran yang tidak hanya menekankan ranah kognitif
- k. Strategi pembelajaran yang variatif, kontekstual, dan dialogis
- l. Penekanan pada *learning how to learn*
- m. Perlu diwujudkan tiga pendekatan: pembiasaan, pembelajaran dan peneladanan

7) Pada lingkungan masyarakat diperlukan

- a. Dorongan pengembangan kemampuan dan partisipasi masyarakat melalui institusi sosial (formal dan informal)
- b. Pendidikan masyarakat yang menekankan modal sosial dan pendidikan moral

## **D. Evaluasi Pendidikan yang Komprehensif dengan Mengacu pada Tujuan Pendidikan Nasional**

### **1) Model evaluasi pendidikan nasional untuk mencapai pendidikan berkualitas**

- (1) Perlu orientasi model evaluasi yang mengarah pada peningkatan mutu lulusan pendidikan Indonesia agar mampu bersaing dalam forum regional dan internasional.
- (2) Perlu penekanan makna evaluasi sebagai piranti yang dapat :
  - a. memberikan garis-pengukur dan data untuk landasan bagi pengambilan keputusan
  - b. menentukan apakah pendidikan telah mengarah pada sasaran atau mencapai hal-hal yang lain (*intended and unintended outcomes*)
  - c. Perlu model evaluasi yang komprehensif menempatkan siswa, kurikulum, sarana-prasarana, guru, biaya, proses dan evaluasi pembelajaran sebagai sasaran evaluasi terpadu.
    - i. Perlu evaluasi yang dapat menilai kemajuan siswa secara utuh, yang meliputi aspek kognitif, psikomotor dan afektif yang mencakup ranah nilai-nilai spiritual, religiositas, emosional, fisik, etika dan moral, budaya.
    - ii. Perlu evaluasi terhadap kurikulum berbasis kompetensi, menyangkut
      - a) kejelasan makna kompetensi dan ambang yang harus dikuasai siswa (*minimum competence*)
      - b) ketentuan tentang materi kurikulum yang paling esensial.
      - c) kejelasan relevansinya dengan standard (ukuran) evaluasi yang akan diterapkan
      - d) kesesuaiannya dengan tingkat kemampuan siswa
      - e) tingkat daya *transformatifnya* terhadap pola pikir dan kreasi siswa (bukan hanya terpaku pada tingkat *transferability* isi kurikulum bagi memori siswa)
      - f) tingkat relevansinya terhadap upaya membangun masyarakat yang maju, sadar imtak- iptek, hak-azasi manusia, gender, solidaritas dan demokrasi.

- d. Perlu evaluasi terhadap ketersediaan sarana-prasarana yang *esensial* yang dibutuhkan oleh masing-masing karakteristik satuan pendidikan.
  - e. Perlu evaluasi terhadap Guru:
    - i. Apakah telah menjadi model bagi siswa, bersifat terbuka, bekerja keras, dapat menilai secara objektif, jujur, adil, dll.
    - ii. Apakah pada setiap mata pelajaran yang diajarkan guru telah memasukkan aspek-aspek budaya, moral-etika.
  - f. perlu evaluasi terhadap kecukupan biaya yang esensial bagi berlangsungnya pembelajaran untuk mencapai pelayanan minimum.
  - g. perlu evaluasi untuk mengetahui bentuk interaksi, tingkat internalisasi dan kontekstualisasi pada proses pembelajaran menyangkut
    - i. interaksi antara guru dan siswa, dan antar siswa yaitu apakah lebih memungkinkan siswa berkembang secara kreatif, solid, berwawasan kesetaraan dan keberagaman dan mampu belajar dari hal-hal yang kongkrit di luar materi yang diberikan oleh guru.
    - ii. internalisasi *hidden curriculum*, 'budaya sekolah' dan sosialisasi 'pranata sosial' di sekolah yang bersifat transformatif menuju masyarakat 'baru'.
    - iii. pelaksanaan ganjaran dan hukuman apakah telah realistis sesuai dengan kasus subjek didik, bukan semata-mata *target (group?)*
    - iv. kontekstualisasi kurikulum dan *hidden curriculum* dengan variasi kebutuhan dan kondisi lingkungan sosial budaya setempat.
  - h. Perlu evaluasi terhadap kesesuaian antara metode evaluasi yang digunakan dengan 'objek evaluasi beserta karakteristik dan konteksnya', termasuk politik otonomi dan pengembangan potensi lokal.
  - i. Metode evaluasinya harus *valid* dan *reliable*
2. **Sistem evaluasi** : Sampai sekarang sistem evaluasi yang dijalankan belum baik dan perlu disempurnakan, agar sistem evaluasi yang akan datang bersifat:

- a. dapat lebih menggambarkan dengan baik dan benar hasil belajar sehingga dapat menjadi petunjuk tentang tonggak yang telah dicapai oleh ikhtiar pendidikan, mencapai tujuan atau belum.
- b. dapat langsung berdampak terhadap kinerja siswa
- c. lebih mampu meningkatkan ranah afeksi
- d. lebih menempatkan kualitas sebagai sasaran daripada kuantitas, dengan cara-cara yang lebih objektif, jujur dan adil
- e. mampu mendorong siswa belajar dalam kelompok sekaligus berani mengeluarkan pendapat pribadinya.
- f. menempatkan *hidden curriculum* sebagai sasaran yang penting dalam evaluasi
- g. mampu menempatkan perangkat hukumnya misalnya UU Sisdiknas sebagai rujukan evaluasi terhadap sistem manajemen (penyelenggaraan pendidikan).
- h. lebih mampu menghasilkan masyarakat pembelajaran.

### **3. Relevansi model evaluasi dengan mutu SDM yang diharapkan**

- a. perlu peningkatan relevansi antara model evaluasi dengan mutu SDM yang diharapkan
- b. perlu diperjelas kriteria dan standar mutu nasional, regional, daerah/ lokal.
- c. perlu evaluasi umum internal yaitu apakah secara umum hasil (*output*) pendidikan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. perlu evaluasi umum eksternal yaitu untuk mengetahui dan menilai bagaimana kontribusi sistem pendidikan nasional terhadap upaya pembentukan masyarakat pembelajaran dan dampaknya terhadap upaya pembentukan masyarakat madani.

### **4. Keterlibaan Masyarakat**

Perlu masyarakat, LSM dan dunia usaha lebih dilibatkan dalam pengendalian kuantitas dan kualitas pendidikan.

**JADWAL ACARA SEMINAR NASIONAL  
REKONSTRUKSI DAN REVITALISASI PENDIDIKAN INDONESIA  
MENUJU MASYARAKAT MADANI  
JAKARTA, 2 SEPTEMBER 2004**

<b>Waktu</b>	<b>Acara / Topik</b>	<b>Pembicara</b>	<b>MC / Moderator</b>	<b>Tempat</b>
8.30 – 9.00	Registrasi			Widya Graha LIPI, Lantai 1
9.00 – 9.15	Pembukaan dan Ucapan Selamat Datang	Dr. Dewi Fortuna Anwar, MA., APU Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan – LIPI dan Ketua Most- Unesco Indonesia	MC : Dra. Mita Noveria, MA	Ruang Semiantr, Widya Graha LIPI, lantai 1
9.15-11.00	Pembicara Kunci	1. Sri Rejeki Sumaryoto, SH Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan  2. Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M.Sc Menteri Pendidikan Nasional  3. Prof. Dr. Fuad Hasan	Dr. H. Arief Rachman, M.Pd.	
11.00 – 11.30	Rehat Kopi dan Konferensi Pers	1. Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M.Sc 2. Sri Redjeki Sumaryoto, SH 3. Prof. Dr. Fuad Hasan 4. Dr. Dewi Fortuna Anwar, MA.,APU 5. Dr. Arief Rachmad, M.Pd 6. Dr. Makmuri Sukarno	Dr. H. Arief Rachman, M.Pd	Ruang Rapat Widya Graha LIPI, lantai 1

Waktu	Acara/Topik	Pembicara	MC/Moderat	Tempat
11.30 – 13.00	Diskusi Panel I : Visi Masyarakat Madani Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Dr. Suwito, MA Pembantu Rektor Universitas Islam Negeri</li> <li>2. Prof. Dr. Taufik Abdullah, APU Peneliti Senior LIPI</li> <li>3. Drs. Yusuf Supiandi, MA</li> </ol>	<p>Dr. Hisyam, MA, APU</p> <p>Notulen: Tine Suartina, SH</p>	Widya Graha LIPI, Lantai 1
13.00 – 14.00	Istirahat, sholat dan makan siang			
14.00 – 15.30	Diskusi Panel II: Mewujudkan Masyarakat Madani Melalui Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Ing., H. Fauzi Bowo Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta</li> <li>2. Dr. Makmuri Sukarno Peneliti LIPI</li> </ol>	<p>Drs. Mahmud Thoha, MA</p> <p>Notulen: Suki D. Sulasiskin</p>	Ruang Seminar Widya Graha LIPI, lantai 1
15.30 – 17.00	Diskusi Panel III: Paradigma Keberhasilan Sistem Pendidikan Menuju Masyarakat MADANI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Dr. Cony R. Semiawan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta</li> <li>2. Romo Mudji Sutrisno Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara</li> <li>3. Dr. Leila Ratna Komala Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas</li> </ol>	<p>Dr. Yekti Manuati, MA</p> <p>Notulen: Erlita Tantri, S. Sos</p>	Ruang Rapat Widya Graha LIPI, lantai 1
17.00	Penutupan	Dr. H. Arief Rachman, M.Pd		

**JADWAL ACARA WORKSHOP  
INTERVENSI PENDIDIKAN DALAM  
PEMBENTUKAN MASYARAKAT MADANI  
JAKARTA, 3 SEPTEMBER 2004**

<b>Waktu</b>	<b>Acara / Topik</b>	<b>Pembicara</b>	<b>MC / Moderator</b>	<b>Tempat</b>
8.30 – 8.45	Registrasi Peserta			Widy Graha LIPI, Lantai 1
8.45 – 9.00	Ucapan Selamat Datang dan Penjelasan Format Workshop	Dr. H. Arief Rachman, M.Pd	MC : Dra. Mita Noveria, MA	Ruang Semianr, Widy Graha LIPI, lantai 1
9.00-9.30	Manajemen Pendidikan dalam Konteks Nasionalisme dan Pluralisme di Era Globalisasi dan Desentralisasi	1. Ace Suryadi, Ph.D Staf Ahli Menteri Bidang Desentralisasi Pendidikan – Depdiknas 2. Dr. Sjisman S. Simanjuntak Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya	Dr. Ikrar Nusa Bhakti	
9.30 – 10.00	Proses Pendidikan Dalam Rangka Memberdayakan dan Memberadatkan Masyarakat	1. Dr. H. Arief Rachman, M.Pd Ketua Harian – Komisi Nasional Indonesia Untuk Unesco 2. Prof. Dr. Paulus Wirotomo, M.Sc Ketua Program Magister Manajemen Pembangunan Sosial UI 3. Dr. Dewi Fortuna Anwar, MA., APU Deputi Bidang IPSK-LIPI dan Ketua Most Unesco Indonesia		
10.00 – 10.30	Evaluasi Pendidikan yang Komprehensif dengan Mengacu pada Tujuan Pendidikan	1. Prof. Dr. H. Toeti Sukanto Guru Besar Universitas Negeri Jakarta 2. Dr. Achmad Subianto Direktur Utama PT. TASPEN 3. Bahrul Hayat, Ph.D Kapsulit Penilaian Pendidikan-Depdiknas		

Waktu	Acara	Fasilitator / Moderator	Tempat
10.30 – 11.00	Pembagian Kelompok dan Rehat Kopi		Widya Graha LIPI, Lantai 1
11.00 – 12.00	<p>Diskusi kelompok bersama narasumber dari masing-masing topik (paralel 3 kelompok) :</p> <p>Kelompok I : Manajemen Pendidikan Dalam Konteks Nasionalisme dan Pluralisme Di Era Globalisasi dan Desentralisasi</p>	<p>Fasilitator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ace Suryadi, Ph.D</li> <li>2. Dr. Djisman Simanjuntak</li> </ol> <p>Reporter :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. Deden</li> <li>2. Dra. Sri Danty, MA</li> </ol>	Ruang Semianr, Widya Graha LIPI, lantai 1
	<p>Kelompok II : Proses Pendidikan Dalam Rangka Memberdayakan dan Memberadapkan Masyarakat</p>	<p>Fasilitator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. H. Arief Rachman, M.Pd</li> <li>2. Prof. Dr. Paulus Wirotomo, M.Sc</li> <li>3. Dr. Dewi Fortuna Anwar, MA., APU</li> </ol> <p>Reporter :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Makmuri Sukarno</li> <li>2. Drs. Syafrudin Setyabudi, M.Hum</li> </ol>	Ruang Rapat Widya Graha LIPI, lantai 1
	<p>Kelompok III : Evaluasi Pendidikan yang Komprehensif dengan Mengacu Pada Tujuan Pendidikan</p>	<p>Fasilitator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Dr. Toeti Sukamto</li> <li>2. Dr. Achmad Subianto</li> <li>3. Bahrul Hayat, Ph.D</li> </ol> <p>Reporter :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Henny Warsilah</li> <li>2. Drs. L. Marbun, MM</li> </ol>	Ruang Rapat Widya Graha LIPI, lantai 10

Waktu	Acara	Fasilitator / Moderator	Tempat
12.00 – 13.00	Istirahat, makan siang dan sholat / sholat Jum'at		Ruang Seminar, dan ruang rapat lantai 1 dan ruang rapat lantai 10
13.00 – 14.30	Lanjutan diskusi kelompok dan perumusan hasil diskusi		Widya Graha LIPI
14.30 – 15.00	Perumusan hasil diskusi bersama nara sumber tiga kelompok	Dr. H. Arief Rachman, M.Pd Dr. Dewi Fortuna Anwar, MA., APU	Ruang Rapat Widya Graha LIPI, lantai 1
15.00 – 15.15	Rehat kopi		Ruang Rapat Widya Graha LIPI, lantai 10
15.15 – 16.30	Pleno – Penyajian rumusan dari masing-masing kelompok oleh ketua kelompok	Dr. Ikrar Nusa Bhakti	
16.30 – selesai	Penutupan	Dr. H. Arief Rachman, M.Pd Dr. Dewi Fortuna Anwar, MA., APU Nurlini Kasrih, SH, M.Si	

